



LAPORAN KINERJA

2018



**Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPMP)
Sulawesi Selatan**

- Jalan Andi Pangerang Petta Rani Makassar
- (0411) 873565, 873513 (0411) 873513
- <http://lpmpsulsel.kemdikbud.go.id>
- lpmp.sulsel@kemdikbud.go.id



Kata Pengantar

KEPALA LPMP SULAWESI SELATAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPMP Sulawesi Selatan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2018 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2018. Secara umum LPMP Sulawesi Selatan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, akan tetapi masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang.

Permasalahan tersebut antara lain belum terbangunnya budaya mutu pada satuan pendidikan, rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, dan terbatasnya kewenangan LPMP dalam melakukan intervensi langsung pada satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan SNP.

Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2018.

Makassar, 28 Januari 2018
Kepala LPMP Sulawesi Selatan

Drs. H. Abdul Halim Muhammam, M.Pd.
NIP 19640715 199403 1 002



DAFTAR ISI

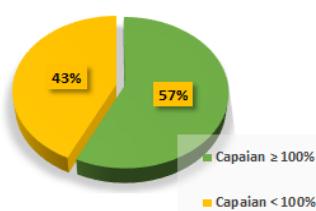
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi.....	2
E. Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	6
A. Capaian Kinerja Organisasi	6
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Dokumen perjanjian kinerja
2. Pengukuran kinerja
3. Penyataan telah direview

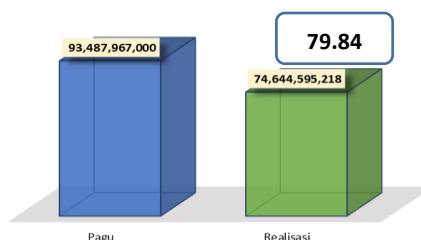
EKSEKUTIF

Laporan kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2018 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat atas pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2015 – 2019. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian dua sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.

RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA



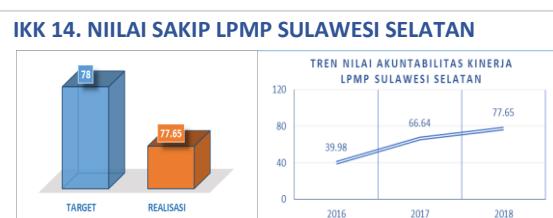
KINERJA ANGGARAN



SK 1. #Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan



SK 2. #Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik.



Permasalahan:

1. LPMP tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi langsung dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
2. Sistem pengumpulan dan pengolahan data mutu yang dikembangkan oleh unit utama belum bekerja secara optimal.
3. Hasil pemetaan mutu belum dimanfaatkan secara optimal untuk menyusun program dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Upaya Penyelesaian

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
2. Penyempurnaan sistem/aplikasi pengumpulan dan pengolahan data mutu.
3. Mendorong pemanfaatan data mutu dalam penyusunan program dan kebijakan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan wilayah kerja meliputi 24 kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, Kepala LPMP Sulawesi Selatan dijabat oleh Dr. H. Abd. Halim Muhamram, M.Pd. yang dilantik pada tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan SK Nomor:111/MPK/RHS/KP/2016.

Pendirian LPMP Sulawesi Selatan berawal dari peralihan fungsi Balai Penataran Guru (BPG) Ujung Pandang sesuai surat keputusan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/O/2003 tertanggal 4 Juli 2003 tentang pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2005 diperbaharui lagi dengan Permendiknas RI No. 7 Tahun 2007 tentang Lembaga Pejaminan Mutu Pendidikan yang merubah kata "**Penjamin**" menjadi "**Penjaminan**". Perubahan dari BPG menjadi LPMP berimplikasi pada perubahan tugas pokok dan fungsi, yakni dari lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan menjadi lembaga penjaminan mutu pendidikan.

LPMP Sulawesi Selatan memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 129 orang PNS dan 47 orang tenaga honorer. Dari 129 PNS terdapat tenaga fungsional tertentu sejumlah 29 orang, pejabat struktural 11 orang, dan fungsional umum 100 orang, dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) sebanyak 9 orang, Magister (S2) sebanyak 54 orang, Sarjana (S1) sebanyak 48 orang, Diploma Tiga (D3) sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 13 orang, SMP dan SD atau masing-masing sebanyak 2 orang.

B. Dasar Hukum

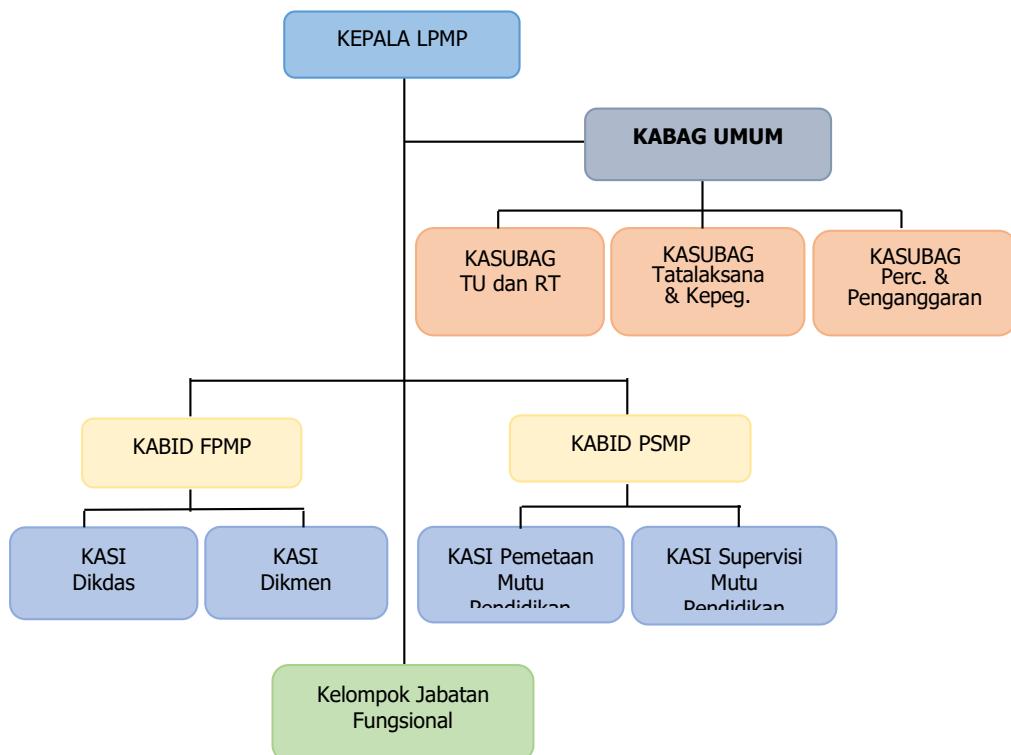
1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan kemendikbud.
5. Permendikbud No. 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas LPMP Sulawesi Selatan adalah melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

D. Struktur Organisasi



E. Isu Strategis

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi LPMP Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah :

1. Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2017, belum ada satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan bahkan masih ada sekolah yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Rendahnya komitmen penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
3. Hasil pemetaan mutu pendidikan belum dimanfaatkan oleh penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan untuk mengawal penjaminan mutu pendidikan.
4. Belum singkronnya rencana pemenuhan mutu pendidikan dengan permasalahan yang ada disetiap satuan pendidikan
5. Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan mutu belum berbasis rencana yang telah ditetapkan.
6. Belum optimalnya Implementasi Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan
7. Masih rendanya tingkat literasi pada satuan pendidikan
8. Belum optimalnya sinergitas LPMP Sulawesi Selatan dengan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pengelola satuan pendidikan guna menfasilitasi pemenuhan mutu disetiap satuan pendidikan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai Standar Nasional Pendidikan yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong di Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Misi
M1	Memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan;
M2	Mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan;
M3	Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan
M4	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan Stategis

Kode	Tujuan Strategis
TS1	Peningkatan capaian SNP satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan
TS2	Peningkatan efektifitas penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan
TS3	Sinergi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
TS4	Penguatan tata kelola birokrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja LPMP Sulawesi Selatan T.A. 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2018	Anggaran
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1	SD yang telah dipetakan mutunya	100%	7.834.626.000
		2	Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya	75%	
		3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
		4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya	80%	
		5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya	80%	26.918.180.0000
		7	SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	
		8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya	70%	
		9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
2	Terwujudnya Tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik	13	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	92%	
		14	Nilai Minimal SAKIP LPMP Sulawesi Selatan	78	

BAB III

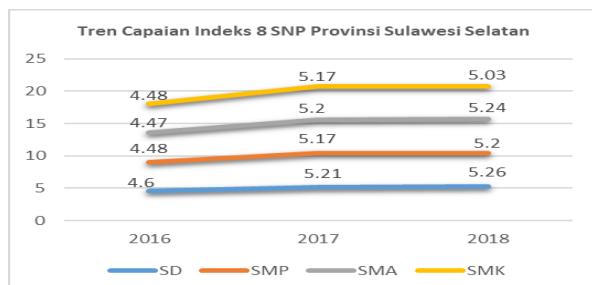
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2018, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan dua sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja untuk dicapai. Berikut uraian tingkat ketercapaian dari sasaran strategis beserta indikator kinerja LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2018.



Sasaran Kegiatan 1. "Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan"



Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diukur dengan skor/indeks 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pemetaan mutu tahun 2018 menunjukkan bahwa kategori capaian SNPnya sama dengan capaian tahun 2017

yaitu pada kategori "menuju SNP 4". Namun demikian, terdapat sedikit penurunan rerata skor capaian SNP khususnya untuk jenjang SMK.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan supervisi serta pemberian bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam upaya pemenuhan 8 SNP.

IKK 1. "SD yang telah dipetakan mutunya"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
97.69%	100%	100%	100%	100%	100%



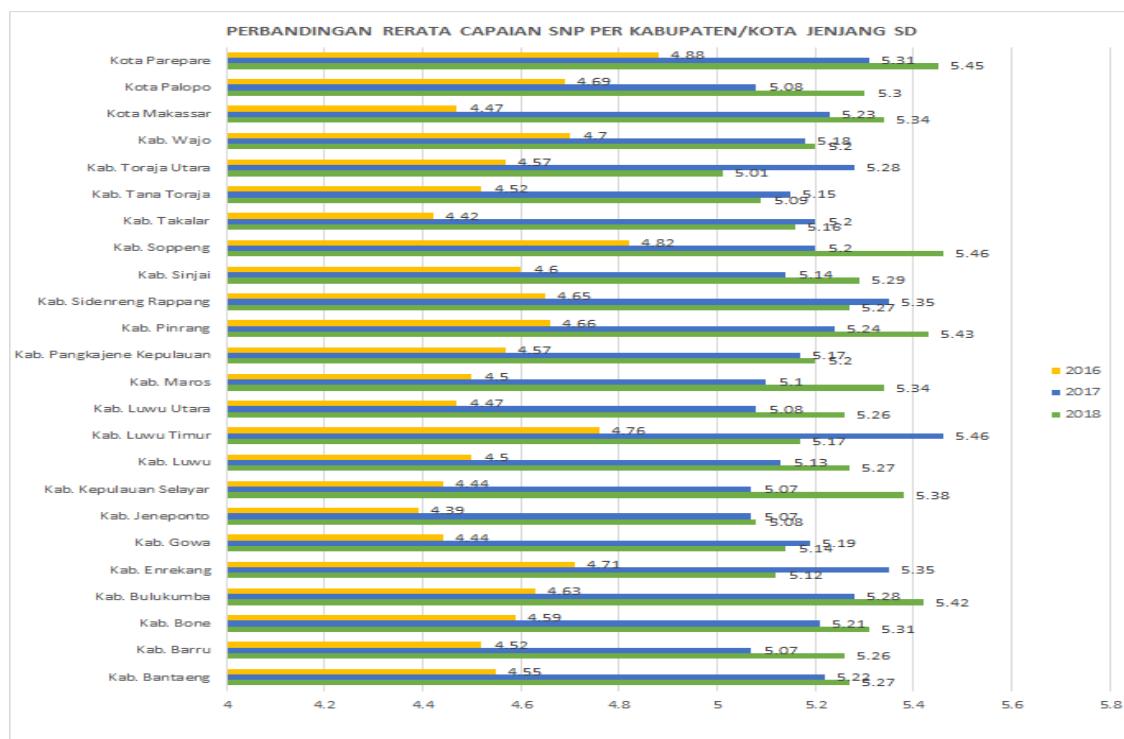
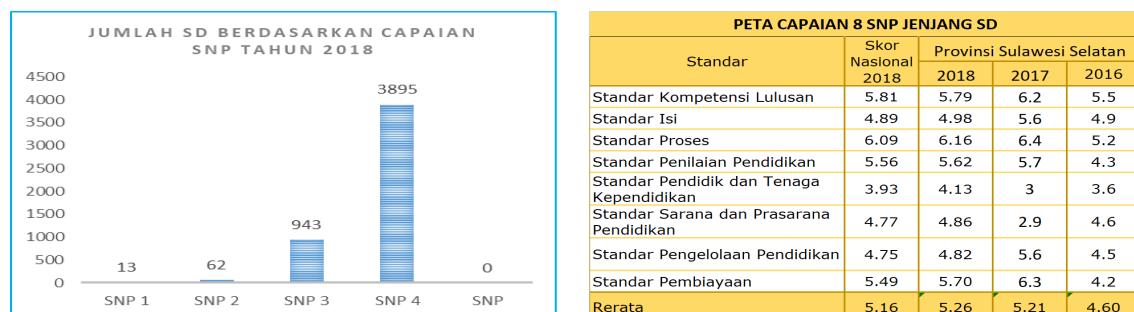
Persentase SD yang dipetakan mutunya pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari target 6434 SD, yang terealisasi sebesar 6413. Sebanyak 10 SD tidak melakukan pemetaan karena sudah tidak operasional lagi dan beberapa sekolah hanya memiliki

siswa sedikit. Namun demikian, dari 6413 SD yang melakukan pemetaan mutu melalui Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP), hanya 4.913 sekolah yang data rapor mutunya dapat diolah.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut antara lain:

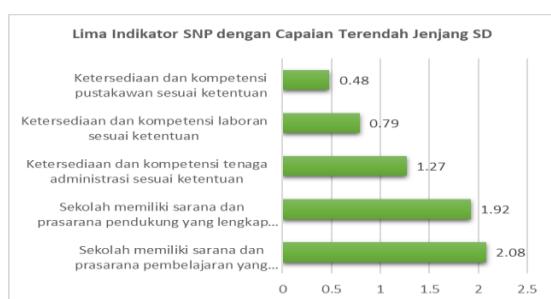
1. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Melakukan bimbingan teknis pemetaan mutu kepada pengawas sekolah dan operator pendataan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Mengoptimalkan fungsi operator sekolah dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (Foppsi) Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemberian penghargaan/reward bagi 10 kabupaten/kota dengan progress pengumpulan data PMP tertinggi.

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD TAHUN 2018



Capaian Mutu Per Indikator Tahun 2018 Jenjang SD

Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.63
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.06
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	5.97
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.44
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.4
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.63
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.41
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.41
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	5.86
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.25
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.48
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.04
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.33
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.28
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.04
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.27
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.79
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0.48
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.27
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.08
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	1.92
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	5.97
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	5.66
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	3.38
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	4.04
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	7.17
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.61
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.76



Hasil pementaan mutu diatas menunjukkan bahwa dari 8 SNP, standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan standar dengan skor terendah (3.6). Kondisi ini patut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penanggung jawab standar tersebut.

Sebagai catatan, bahwa dari 8 (delapan) SNP, tiga standar (PTK, Sapras, dan Pembiayaan) merupakan kewenangan pemerintah daerah dan LPMP sebagai UPT Kemdikbud tidak dapat melakukan intervensi langsung terhadap ketiga standar tersebut.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Beberapa satuan pendidikan masih terdaftar di Dapodik, padahal sudah tidak operasional lagi (tidak aktif/tutup), dan memiliki NPSN ganda.
2. Satuan pendidikan terlambat mengirim data ke aplikasi karena adanya pergantian operator, kepala sekolah baru, aplikasi PMP dengan DAPODIK tidak bisa terkoneksi, dan masalah jaringan internet.
3. Masih ada beberapa standar SNP yang belum terbaca dengan baik oleh sistem/aplikasi sehingga data mutu yang dihasilkan jadi bias.
4. Jumlah pertanyaan instrument pemetaan mutu pendidikan yang banyak menyebabkan kejemuhan responden dalam menjawab pertanyaan.



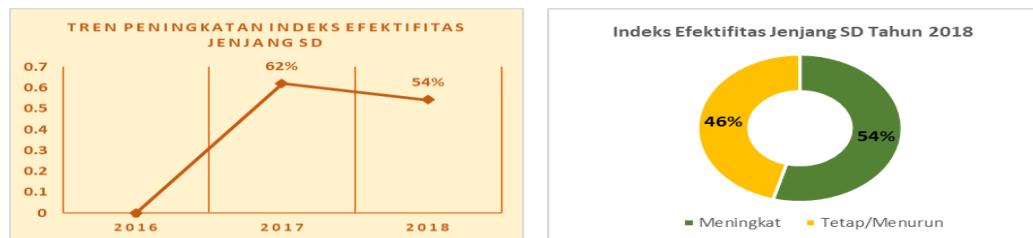
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

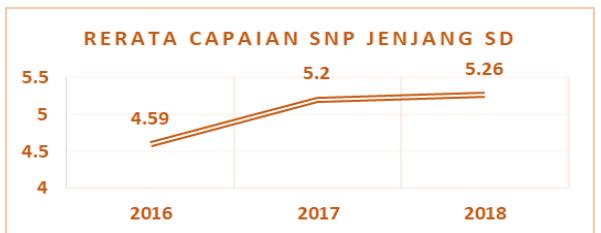
1. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk meningkatkan validitas data satuan pendidikan.
2. Melakukan bimtek pengelola data dapodik.
3. Melakukan pembimbingan secara khusus terhadap satuan pendidikan yang bermasalah dalam pengiriman data PMP baik melalui kunjungan langsung maupun media online.
4. Melakukan koordinasi dengan Satgas PMP di Pusat untuk memaksimalkan pemrosesan dan pengolahan data.

IKK 2. "Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
62%	75%	54%	72%	95%	57%

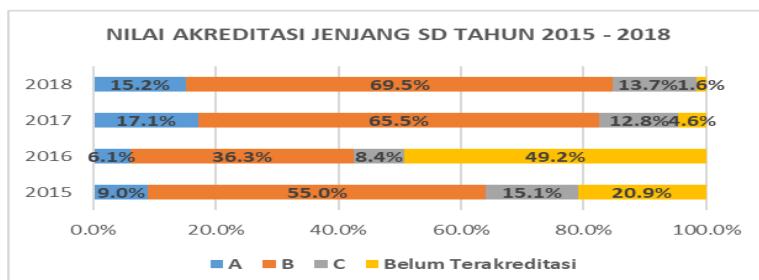
Indikator ini diukur dengan melihat jumlah satuan pendidikan yang meningkat capaian SNPnya.





sebelumnya. Rendahnya capaian tersebut antara lain karena adanya peningkatan pemahaman terkait tujuan pelaksanaan pemetaan mutu yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan yang akan menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu. Selain itu, rendahnya realisasi tersebut juga disebabkan tidak singkronnya aplikasi PMP dan Dapodik menyebabkan beberapa data error dan kurangnya data SD yang dapat diolah. Dari 6413 SD yang melakukan pemetaan, hanya 4913 SD yang dapat diukur tingkat efektifitasnya.

Meskipun capaian tahun 2018 lebih rendah dari capaian tahun 2017, akan tetapi rerata SNP untuk jenjang SD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rerata skor SNP jenjang SD tahun 2018 sebesar 5.26 lebih tinggi dibanding dengan rerata skor nasional sebesar 5.16.



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, 2016, 2017, 2018

Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan antara lain:

1. Pengembangan sekolah model SPMI pada 389 SD. Setiap sekolah model selanjutnya melakukan pengimbasan SPMI kepala 5 sekolah lainnya.
2. Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 pada 6424 SD.
3. Fasilitasi dan supervisi mutu pendidikan melalui kemitraan dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk workshop penulis buku (literasi), diklat pola pikir, pelatihan pembinaan kelompok kerja pengawas sekolah, seleksi calon kepala sekolah, fasilitasi penguatan kepala sekolah, dan bimbingan teknis persiapan pendidikan profesi guru.

Permasalahan :

1. Terbatasnya kewenangan LPMP dalam upaya pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
2. Rapor mutu belum sepenuhnya digunakan oleh satuan pendidikan untuk menyusun rencana pemenuhan mutu (RKA/RKT/RKS).

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2018, realisasi indikator persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 54% atau 2665 SD. Capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun

Peningkatan indeks efektifitas satuan pendidikan dapat pula dilihat dari status akreditasi satuan pendidikan.

3. Rapor mutu belum terbit seluruhnya karena adanya keterbatasan pada aplikasi sehingga belum dapat melakukan pemrosesan dan pengolahan data dengan maksimal.
4. Keterlambatan keluarnya rapor mutu 2018.
5. Kurang singkronnya aplikasi PMP dan Dapodik menyebabkan rapor mutu untuk standar yang sumber datanya berasal dari Dapodik kurang valid.
6. Perbedaan jumlah sekolah yang dapat diolah datanya tahun 2017 dan 2018.

Langkah antisipasi :

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan.
2. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat rapor mutu untuk peningkatan mutu satuan pendidikan.
3. Melakukan koordinasi dengan satgas pusat PMP terkait pengembangan aplikasi dan ketersediaan data mutu.
4. Pengukuran indeks dilakukan dengan menggunakan data satuan pendidikan yg berhasil diolah datanya pada tahun 2017 dan 2018.

IKK 3. "SMP yang telah dipetakan mutunya"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
93.46%	100%	98.79%	98.79%	100%	98.79%

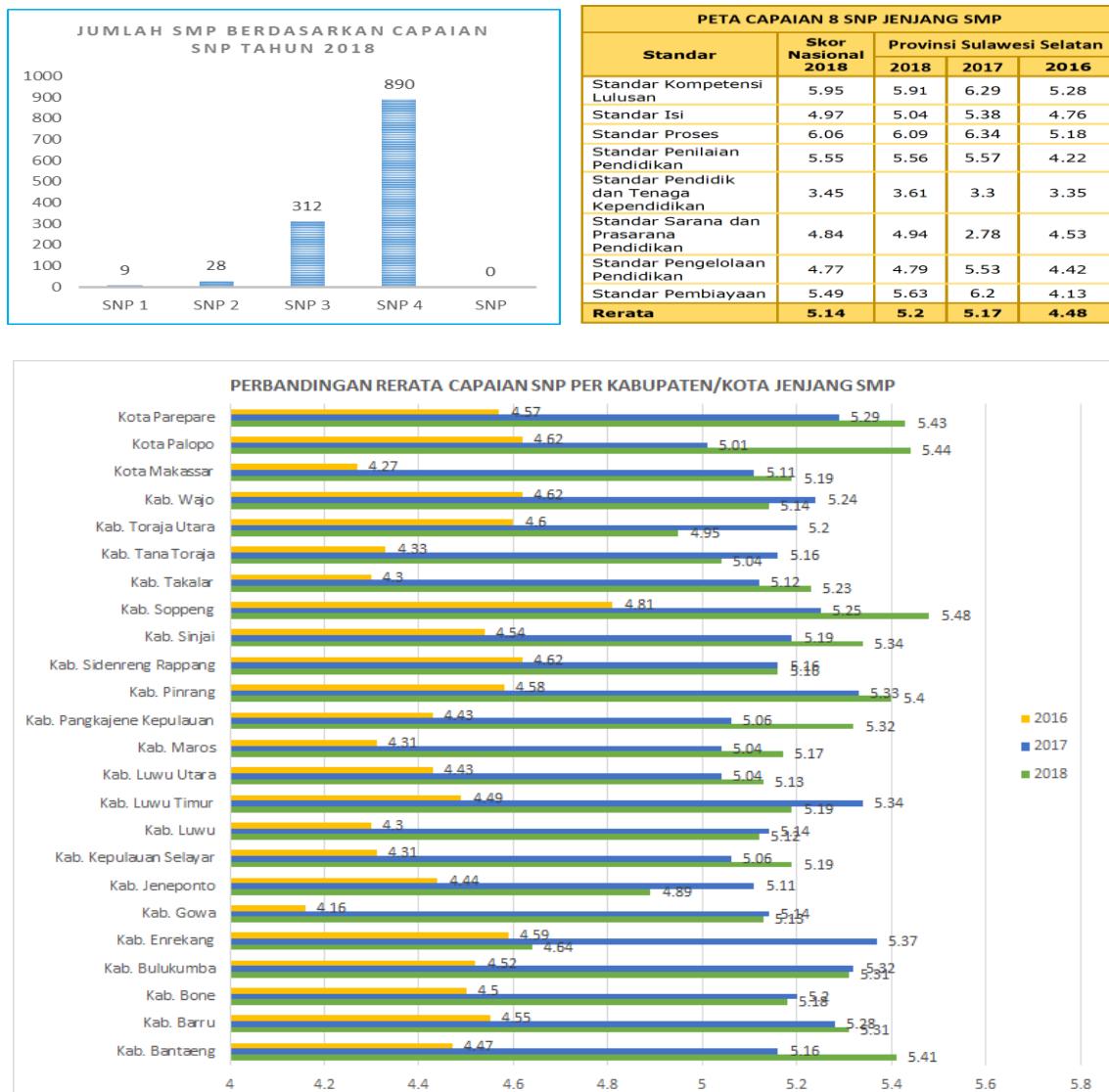


Percentase SMP yang dipetakan mutunya pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari target 1648 SMP, yang terealisasi sebesar 1628 atau 98.79%. Namun demikian, dari 1628 SMP yang melakukan pemetaan mutu melalui Aplikasi PMP, hanya 1239 SMP yang dapat diolah rapor mutunya.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut antara lain:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Melakukan bimbingan teknis pemetaan mutu kepada pengawas sekolah dan operator pendataan dinas provinsi/kabupaten/kota.
3. Mengoptimalkan fungsi operator sekolah dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan FOPPSI Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemberian penghargaan/reward bagi 10 kabupaten/kota dengan progress pengiriman data PMP tertinggi.

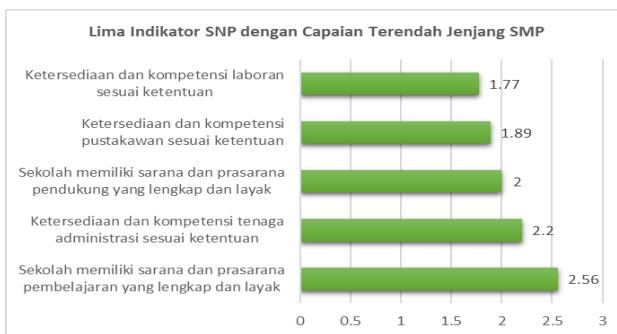
PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP TAHUN 2018



Capaian Mutu Per Indikator Tahun 2018 Jenjang SMP

Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.58
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.19
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.12
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	4.88
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.3
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.33
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.26
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.34
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	5.69

Indikator	Capaian SNP
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.24
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.27
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	5.92
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.05
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.24
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.29
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	4.58
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	2.2
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	1.77
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.89
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.3
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.56
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	5.88
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	5.58
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	3.25
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	3.91
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	7.07
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.47
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.69



Data diatas menunjukkan bahwa dari 8 SNP, standar PTK merupakan standar dengan skor terendah. Kondisi ini patut mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggung jawab standar tersebut.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Beberapa satuan pendidikan masih terdaftar di Dapodik, padahal sudah tidak aktif/tutup.
2. Satuan pendidikan terlambat mengirim data ke aplikasi karena adanya pergantian operator, kepala sekolah baru, aplikasi PMP dengan DAPODIK tidak bisa terkoneksi, dan masalah jaringan internet.
3. Masih ada beberapa standar SNP yang belum terbaca dengan baik oleh sistem/aplikasi sehingga data mutu yang dihasilkan jadi bias.

- Jumlah pertanyaan instrument pemetaan mutu pendidikan yang banyak menyebabkan kejemuhan responden dalam menjawab.

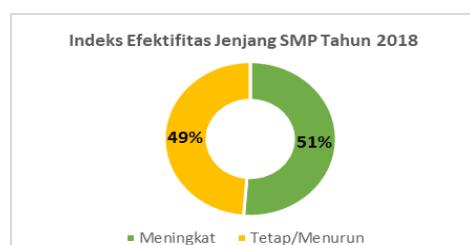
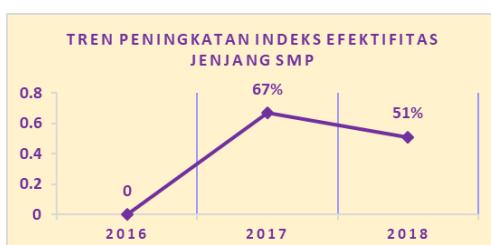
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

- Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk meningkatkan validitas data satuan pendidikan.
- Melakukan pembimbingan secara khusus terhadap satuan pendidikan yang bermasalah dalam pengiriman data PMP ke aplikasi baik melalui kunjungan langsung maupun media online.
- Melakukan koordinasi dengan Satgas PMP di Pusat untuk memaksimalkan pemrosesan dan pengolahan data.

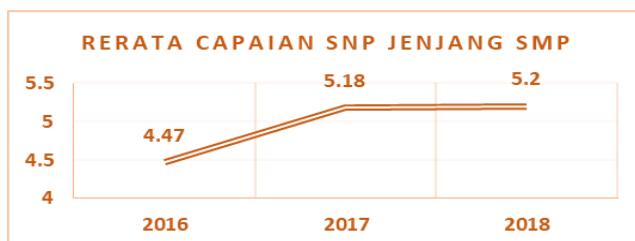
IKK 4. "Percentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%Capaian		
67%	80%	51.25%	64.06%	95%	54%

Indikator ini diukur dengan melihat jumlah satuan pendidikan yang meningkat capaian SNPnya.



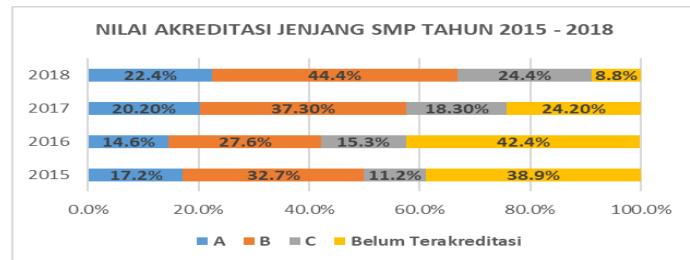
Realisasinya indikator kinerja ini sebesar 51% atau 635 SMP. Capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 67%. Rendahnya capaian tersebut antara lain karena adanya peningkatan pemahaman terkait tujuan pelaksanaan pemetaan mutu yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan yang akan menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu. Selain itu, rendahnya realisasi tersebut juga disebabkan tidak singkronnya aplikasi PMP dan Dapodik menyebabkan beberapa data error dan kurangnya data SMP yang dapat diolah. Dari 1.648 SMP yang melakukan pemetaan, hanya 1.239 SMP yang dapat diukur tingkat efektifitasnya.



Meskipun jumlah SMP yang meningkat capaian SNP-nya lebih rendah dari capaian tahun 2017, akan tetapi rerata SNP untuk jenjang SMP mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Rerata capaian SNP tahun 2018 lebih tinggi dari rerata skor nasional sebesar 5.14.

Selain berdasarkan tingkat capaian SNP, peningkatan indeks efektifitas satuan pendidikan dapat pula dilihat dari status akreditasi satuan pendidikan.



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, 2016, 2017, 2018

Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan antara lain:

1. Pengembangan sekolah model SPMI pada 84 SMP. Setiap sekolah model selanjutnya melakukan pengimbangan SPMI kepala 5 sekolah lainnya.
2. Pendampingan implementasi kurikulum 2013 pada 1648 SMP.
3. Fasilitasi dan supervisi mutu pendidikan melalui kemitraan dengan beberapa pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk bimbingan teknis SPMI bagi sekolah rujukan, workshop penulis buku (literasi), diklat pola pikir, pelatihan pembinaan kelompok kerja pengawas sekolah, seleksi calon kepala sekolah, fasilitasi penguatan kepala sekolah, dan bimtek persiapan pendidikan profesi guru.

Petugas verifikasi LPMP sedang berdiskusi dengan operator pendataan di salah satu sekolah pada kegiatan verifikasi dan validasi data mutu pendidikan



Permasalahan :

1. Terbatasnya kewenangan LPMP dalam upaya pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
2. Rapor mutu belum sepenuhnya digunakan oleh satuan pendidikan untuk menyusun rencana pemenuhan mutu (RKA/RKT/RKS).
3. Aplikasi pengolahan rapor mutu belum dapat bekerja secara maksimal utamanya pada standar PTK dan sarana dan prasarana.
4. Kurang singkronnya aplikasi PMP dan Dapodik menyebabkan rapor mutu untuk standar yang sumber datanya berasal dari Dapodik kurang valid.
5. Keterlambatan keluarnya rapor mutu 2018.
6. Perbedaan jumlah satuan pendidikan yang dapat diolah datanya tahun 2017 dan 2018.

Langkah antisipasi :

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan.
2. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat rapor mutu untuk peningkatan mutu satuan pendidikan.
3. Melakukan koordinasi dengan satgas pusat PMP terkait pengembangan aplikasi dan ketersediaan data mutu.
4. Pengukuran indeks dilakukan dengan menggunakan data satuan pendidikan yg berhasil diolah datanya pada tahun 2017 dan 2018.

IKK 5. "SMA yang telah dipetakan mutunya"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
88.10	100%	95.38%	95.38%	100%	95.38%

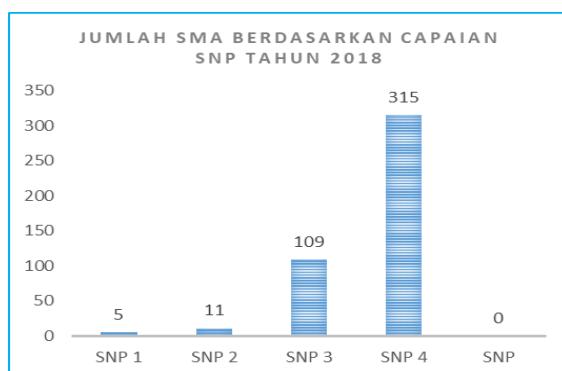


Persentase SMA yang dipetakan mutunya pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari target 584 SMA, yang terealisasi sebesar 557 atau 95.38%. Namun

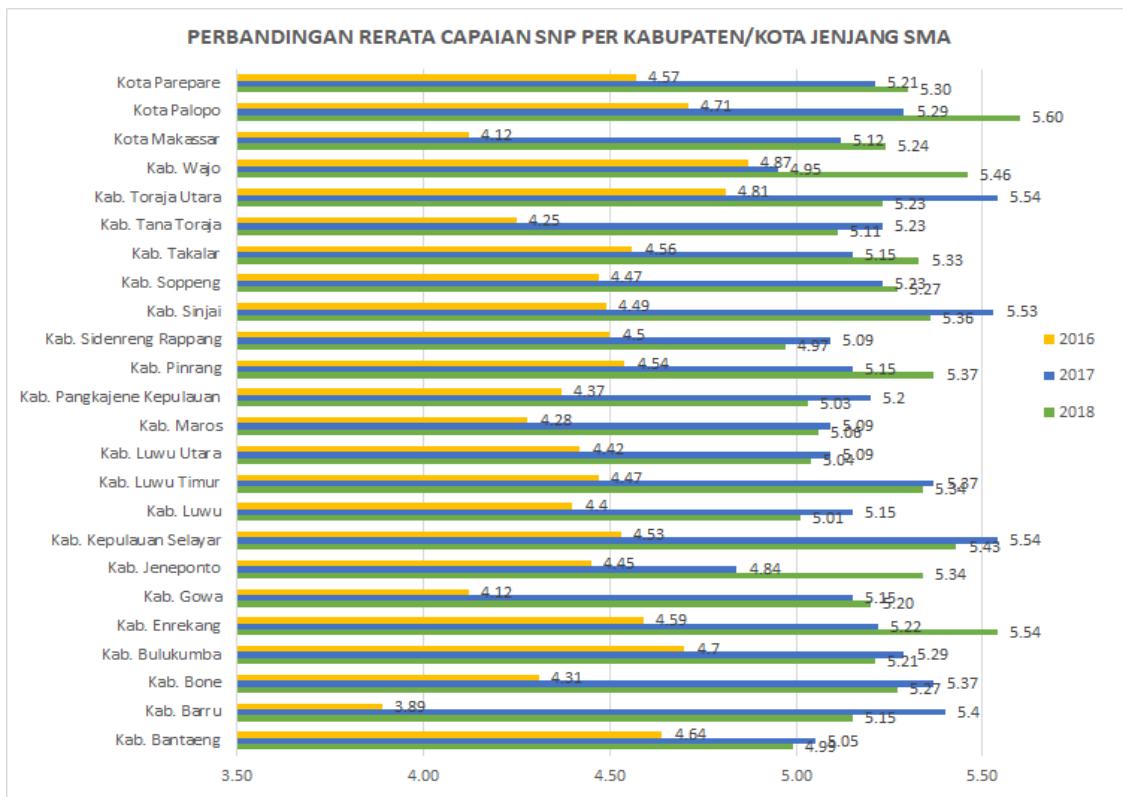
demikian, dari 557 SMA yang melakukan pemetaan mutu melalui Aplikasi PMP, hanya 440 SMA yang data rapor mutunya dapat diolah.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut adalah mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan bimbingan teknis pemetaan mutu kepada pengawas sekolah dan operator pendataan dinas pendidikan provinsi, mengoptimalkan fungsi operator sekolah dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan FOPPSI Propinsi Sulawesi Selatan, dan pemberian penghargaan/reward bagi 10 kabupaten/kota dengan progress pengiriman data tertinggi.

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMA TAHUN 2018



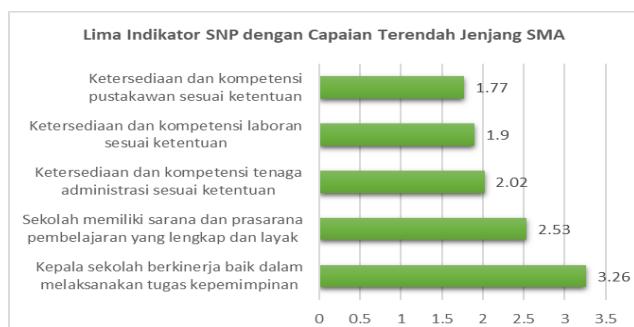
Standar	Skor Nasional 2018	PETA CAPAIAN 8 SNP JENJANG SMA		
		Provinsi Sulawesi Selatan 2018	2017	2016
Standar Kompetensi Lulusan	6.08	6.05	6.5	5.65
Standar Isi	5	5.04	5.28	4.61
Standar Proses	6.1	6.11	6.45	5.12
Standar Penilaian Pendidikan	5.67	5.58	5.77	4.1
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.53	3.62	3.3	3.44
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	5.11	5.14	2.89	4.62
Standar Pengelolaan Pendidikan	4.84	4.82	5.69	4.41
Standar Pembinaan	5.54	5.56	5.72	3.8
Rerata	5.23	5.24	5.2	4.47



Capaian Mutu Per Indikator Tahun 2018 Jenjang SMA

Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.59
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.57
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.31
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	4.43
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.38
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.82
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.25
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.42
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	5.75
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.3
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.24
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	5.88
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.08
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.66
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.36

Indikator	Capaian SNP
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	4.21
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	2.02
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	1.9
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.77
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.52
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.53
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	3.59
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	5.89
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	5.69
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	3.26
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	3.91
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.86
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.42
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.71



Hasil pemetaan mutu tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 8 SNP, standar PTK merupakan standar dengan rerata terendah (3.34). Kondisi ini patut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sebagai penanggung jawab standar tersebut.

Sebagai catatan, bahwa dari 8 (delapan) SNP, tiga standar (PTK, Sapras, dan Pembiayaan) merupakan kewenangan pemerintah daerah dan LPMP sebagai UPT Kemdikbud tidak dapat melakukan intervensi langsung terhadap ketiga standar tersebut.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Beberapa satuan pendidikan tidak mengirim data karena sudah tidak beroperasi/tutup, sudah tidak memiliki siswa, memiliki NPSN ganda.
2. Satuan pendidikan terlambat mengirim data ke aplikasi karena adanya pergantian operator, kepala sekolah baru, aplikasi PMP dengan DAPODIK tidak bisa terkoneksi, dan masalah jaringan internet.
3. Masih ada beberapa standar SNP yang belum terbaca dengan baik oleh sistem/aplikasi sehingga data yang dihasilkan tidak valid.

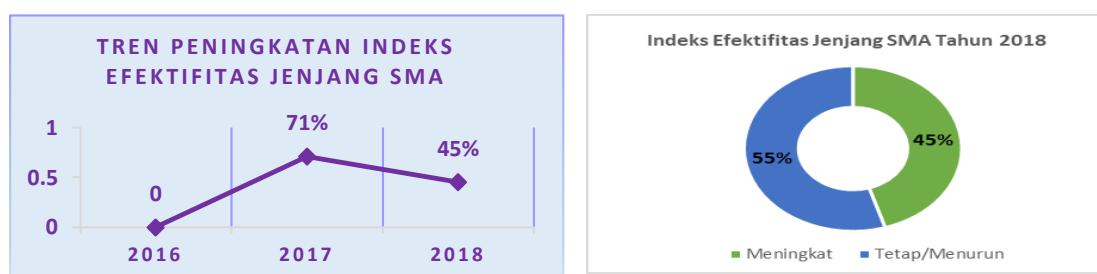
Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan propinsi/kabupaten/kota untuk meningkatkan vadilitas data satuan pendidikan.
2. Melakukan pembimbingan secara khusus terhadap satuan pendidikan yang bermasalah dalam pengiriman data PMP ke apliksai baik melalui kunjungan langsung maupun media online.
3. Melakukan koordinasi dengan Satgas PMP di Pusat untuk memaksimalkan pemprosesan dan pengolahan data.

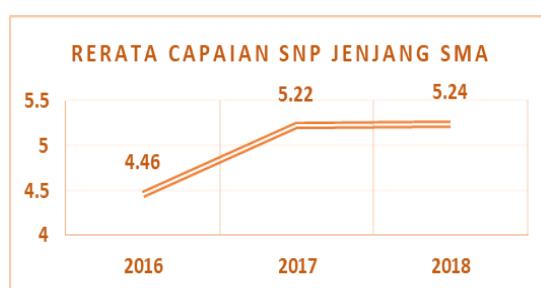
IKK 6. "Percentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%Capaian		
71%	80%	45%	57%	95%	48%

Indikator ini diukur dengan melihat jumlah satuan pendidikan yang meningkat kategori capaian SNPnya.



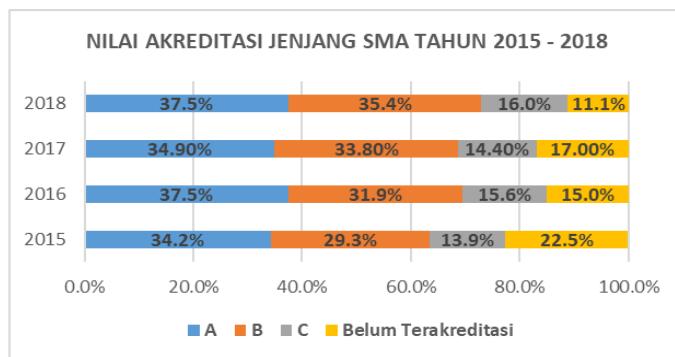
Khusus capaian 2018, realisasinya sebesar 45% atau 199 SMA. Capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 71%. Rendahnya capaian tersebut antara lain karena adanya peningkatan pemahaman terkait tujuan pelaksanaan pemetaan mutu yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan yang akan menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu satuan pendidikan. Selain itu, rendahnya realisasi tersebut juga disebabkan tidak singkronnya aplikasi PMP dan Dapodik menyebabkan beberapa data error dan kurangnya data SMA yang dapat diolah. Dari 557 SMA yang melakukan pemetaan, hanya 440 SMA yang dapat diukur tingkat efektifitasnya.



Meskipun jumlah SMA yang meningkat capaian SNP-nya lebih rendah dari capaian tahun 2017, akan tetapi rerata SNP untuk jenjang SMA mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian rerata SNP sedikit lebih tinggi dibanding rerata SNP nasional sebesar 5.23.

Selain berdasarkan tingkat capaian SNP, peningkatan indeks efektifitas satuan pendidikan dapat pula dilihat dari status akreditasi satuan pendidikan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan antara lain melalui kegiatan pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 pada 575 SMA dan supervisi dan fasilitasi pengembangan sekolah model SPMI pada 26 SMA.



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, 2016, 2017, 2018

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain: Terbatasnya kewenangan dan anggaran LPMP dalam upaya pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan.

1. Rapor mutu belum sepenuhnya digunakan oleh satuan pendidikan untuk menyusun rencana pemenuhan mutu (RKA/RKT/RKS).
2. Aplikasi pengolahan rapor mutu belum dapat bekerja secara maksimal utamanya pada standar PTK dan sarana dan prasarana.
3. Keterlambatan keluarnya rapor mutu 2018.
4. Perbedaan jumlah satuan pendidikan yang dapat diolah datanya tahun 2017 dan 2018.

Langkah antisipasi :

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan.
2. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat rapor mutu untuk peningkatan mutu satuan pendidikan.
3. Melakukan koordinasi dengan satgas pusat PMP terkait pengembangan aplikasi dan ketersediaan data mutu.
4. Pengukuran indeks dilakukan dengan menggunakan data satuan pendidikan yg berhasil diolah datanya pada tahun 2017 dan 2018.

Penyusunan
rekomendasi
peningkatan mutu
berdasarkan hasil
pemetaan mutu 2018



IKK 7. "SMK yang telah dipetakan mutunya"

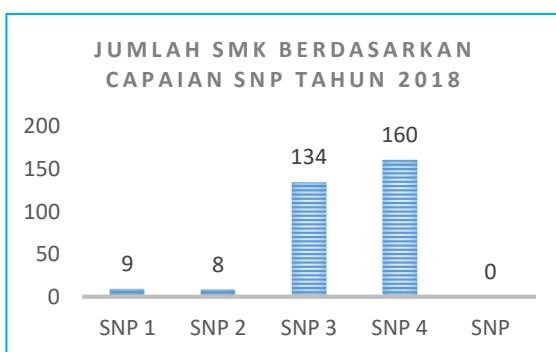
Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
80.50%	90%	100%	102%	90%	92%



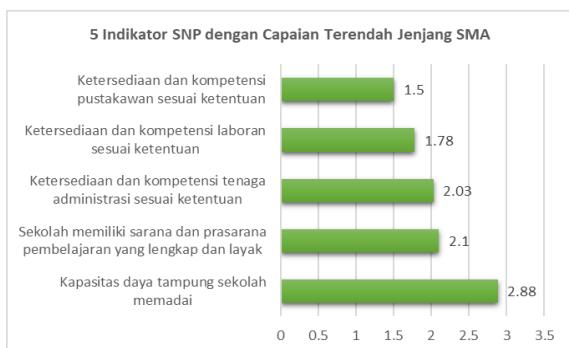
Percentase SMK yang dipetakan mutunya pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari target 441 SMK, yang terealisasi sebesar 404 atau 91.61%. Namun demikian, dari 404 SMK yang melakukan pemetaan mutu melalui Aplikasi PMP, hanya 311 SMK yang data rapor mutunya dapat diolah.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator tersebut adalah mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, melakukan bimbingan teknis pemetaan mutu kepada pengawas sekolah dan operator pendataan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, mengoptimalkan fungsi operator sekolah dengan menjalin komunikasi yang efektif dengan FOPPSI Propinsi Sulawesi Selatan, dan pemberian penghargaan/reward bagi 10 kabupaten/kota dengan progress pengiriman data tertinggi.

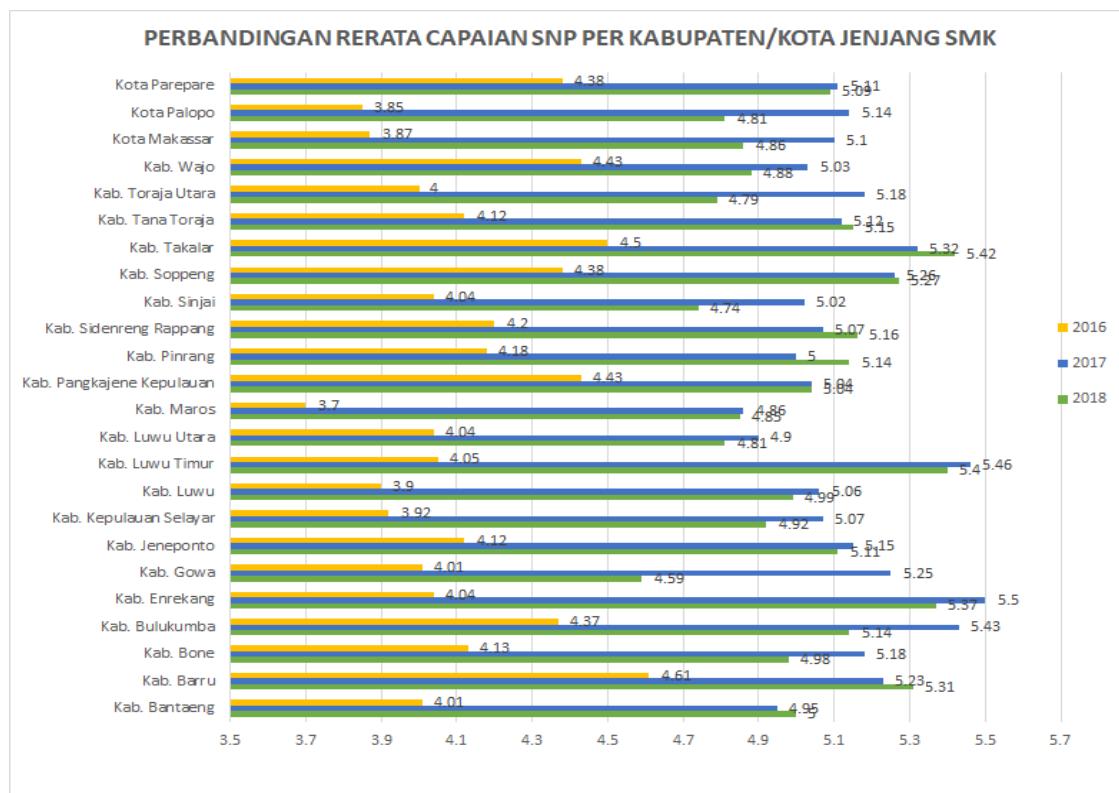
PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMK TAHUN 2018



Standar	Skor Nasional 2018	PETA CAPAIAN 8 SNP JENJANG SMK		
		Provinsi Sulawesi Selatan	2018	2017
Standar Kompetensi Lulusan	5.99	6.02	6.29	5.28
Standar Isi	4.79	4.94	5.38	4.76
Standar Proses	6.03	6.15	6.34	5.18
Standar Penilaian Pendidikan	5.51	5.54	5.57	4.22
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.35	3.41	3.3	3.35
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.71	3.77	2.78	4.53
Standar Pengelolaan Pendidikan	4.71	4.82	5.53	4.42
Standar Pembiayaan	5.53	5.58	6.2	4.13
Rerata	4.95	5.03	5.17	4.48



Data peta mutu diatas menunjukkan bahwa dari 8 SNP, standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan standar dengan rerata terendah (3.35). Kondisi ini patut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah (kabupaten/kota) sebagai penanggung jawab standar tersebut.



Capaian Mutu Per Indikator Tahun 2018 Jenjang SMK

Indikator	Capaian SNP
Standar Kompetensi Lulusan	
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6.55
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4.22
Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6.26
Standar Isi	
Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	4.56
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	5.42
Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5.77
Standar Proses	
Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.21
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.43
Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	5.64
Standar Penilaian Pendidikan	
Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.09
Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.07
Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	5.7
Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.88
Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.63
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.03
Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	3.96
Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	2.03

Indikator	Capaian SNP
Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	1.78
Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.5
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
Kapasitas daya tampung sekolah memadai	2.88
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.1
Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	3.31
Standar Pengelolaan Pendidikan	
Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	5.71
Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	5.64
Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.91
Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	3.89
Standar Pembiayaan	
Sekolah memberikan layanan subsidi silang	7.03
Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.43
Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	3.7

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Beberapa satuan pendidikan tidak mengirim data karena sudah tidak operasional, sudah tidak memiliki siswa, memiliki NPSN ganda.
2. Satuan pendidikan terlambat mengirim data ke aplikasi karena adanya pergantian operator, kepala sekolah baru, aplikasi PMP dengan DAPODIK tidak bisa terkoneksi, dan masalah jaringan internet.
3. Masih ada beberapa standar SNP yang belum terbaca dengan baik oleh sistem/aplikasi sehingga data yang dihasilkan tidak valid.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

4. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi untuk meningkatkan vadilitas data satuan pendidikan.
5. Melakukan pembimbingan secara khusus terhadap satuan pendidikan yang bermasalah dalam pengiriman data PMP.
6. Melakukan koordinasi dengan Satgas PMP di Pusat untuk memaksimalkan pemrosesan dan pengolahan data.

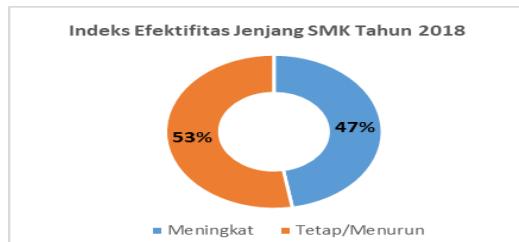
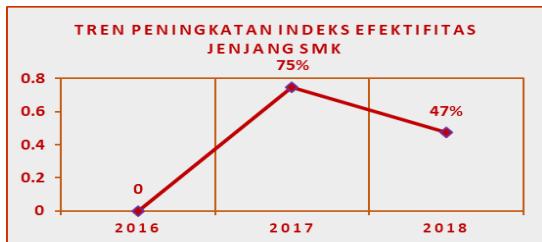
Fasilitator sedang membawakan materi pada kegiatan bimtek pengawas pengumpul data. Kegiatan ini melibatkan unsur pengawas sekolah dan operator pendataan pada masing-masing kabupaten/kota



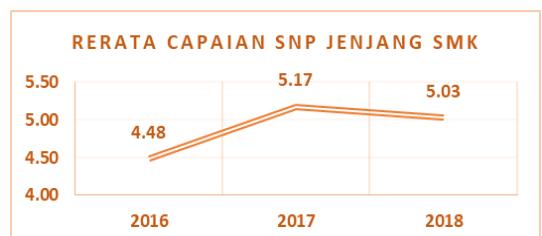
IKK 8. "Percentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	%Capaian		
75%	80%	47%	68%	95%	50%

Indikator ini diukur dengan melihat jumlah satuan pendidikan yang meningkat kategori capaian SNPnya.

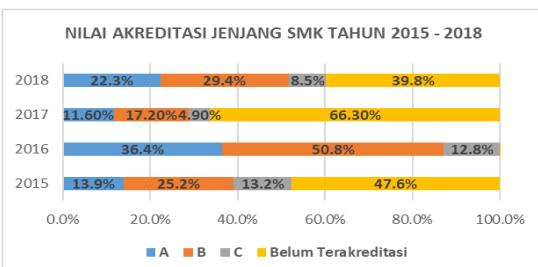


Realisasi indikator kinerja persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 47% atau 147 SMK. Capaian tersebut lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 75%. Rendahnya capaian tersebut antara lain karena adanya peningkatan pemahaman terkait tujuan pelaksanaan pemetaan mutu yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan yang akan menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu satuan pendidikan. Selain itu, rendahnya realisasi tersebut juga disebabkan tidak singkronnya aplikasi PMP dan Dapodik menyebabkan beberapa data error, dan kurangnya data SMK yang dapat diolah. Dari 404 SMK yang melakukan pemetaan, hanya 311 SMK yang dapat diukur tingkat efektifitasnya.



Pada tahun 2018, rerata skor SNP jenjang SMK menurun 0.11 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2017, tetapi lebih tinggi dibanding rerata skor SNP nasional sebesar 4.95.

Selain berdasarkan tingkat capaian SNP, peningkatan indeks efektifitas satuan pendidikan dapat pula dilihat dari status akreditasi satuan pendidikan.



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, 2016, 2017, 2018

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks efektifitas SMK adalah supervisi dan fasilitasi pengembangan sekolah model SPMI pada 24 SMK, pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 pada 4223 SMA.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian takrget kinerja antara lain:

1. Terbatasnya kewenangan dan anggaran LPMP dalam upaya pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
2. Rapor mutu belum sepenuhnya digunakan oleh satuan pendidikan untuk melakukan peningkatan mutu.
3. Aplikasi pengolahan rapor mutu belum dapat bekerja secara maksimal utamanya pada standar PTK dan sarana dan prasarana.
4. Keterlambatan keluarnya rapor mutu 2018.
5. Perbedaan jumlah satuan pendidikan yang dapat diolah datanya tahun 2017 dan 2018.

Langkah antisipasi :

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan.
2. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan manfaat rapor mutu untuk peningkatan mutu satuan pendidikan.
3. Melakukan koordinasi dengan satgas pusat PMP terkait pengembangan aplikasi dan ketersediaan data mutu.
4. Pengukuran indeks dilakukan dengan menggunakan data satuan pendidikan yg berhasil diolah datanya pada tahun 2017 dan 2018.

IKK 9. "Percentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
57.74%	60%	100%	166%	80%	125%



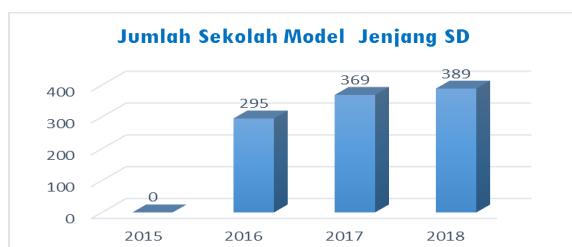
Realisasi kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP hingga tahun 2018 mencapai 100% (6424 SD). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 60%. Hal ini terjadi karena adanya percepatan penuntasan program fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 yang semula direncanakan akan dituntaskan pada tahun 2019. Ketercapaian indikator kinerja

tersebut didukung oleh kegiatan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Pendampingan dan Supervisi Sekolah Model SPMI.

Khusus capaian tahun 2018, dari total 6434 SD, sebanyak 2724 difasilitasi melalui kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 dan sebanyak 389 yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program sekolah model SPMI. Semua sekolah model SPMI telah difasilitasi dalam penerapan kurikulum 2013 pada tahun-tahun sebelumnya.

a. Pendampingan Sekolah Model SPMI

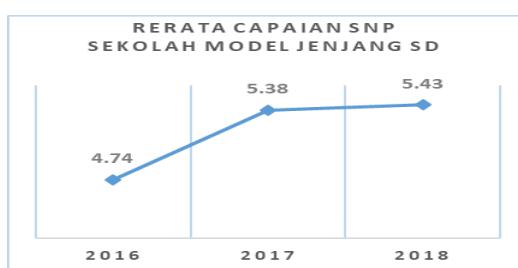
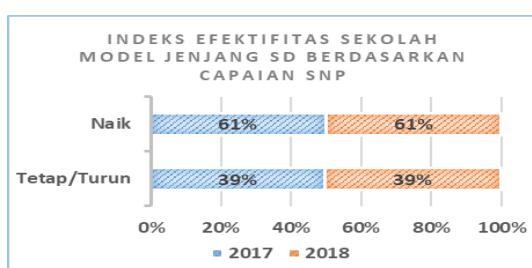
Pendampingan sekolah model bertujuan untuk membentuk budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus SPMI, mulai dari pemetaan mutu, perencanaan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan strategi baru.



Pada tahun 2018 jumlah sekolah model jenjang SD yang dikembangkan mutu pendidikannya sebanyak 389 sekolah. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan

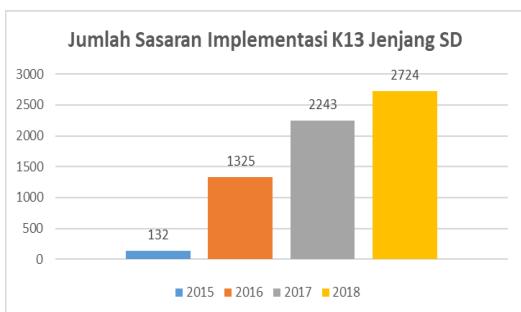
dalam perjanjian kinerja yaitu sejumlah 369 sekolah. Tingginya realisasi capaian tersebut dikarenakan adanya pengalihan kuota sekolah model dari jenjang SMA sebanyak 20 sekolah ke jenjang SD.

Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2018, dari 294 sekolah model jenjang SD yang keluar rapor mutunya, sebanyak 178 SD atau 61% yang meningkat indeks efektifitasnya.

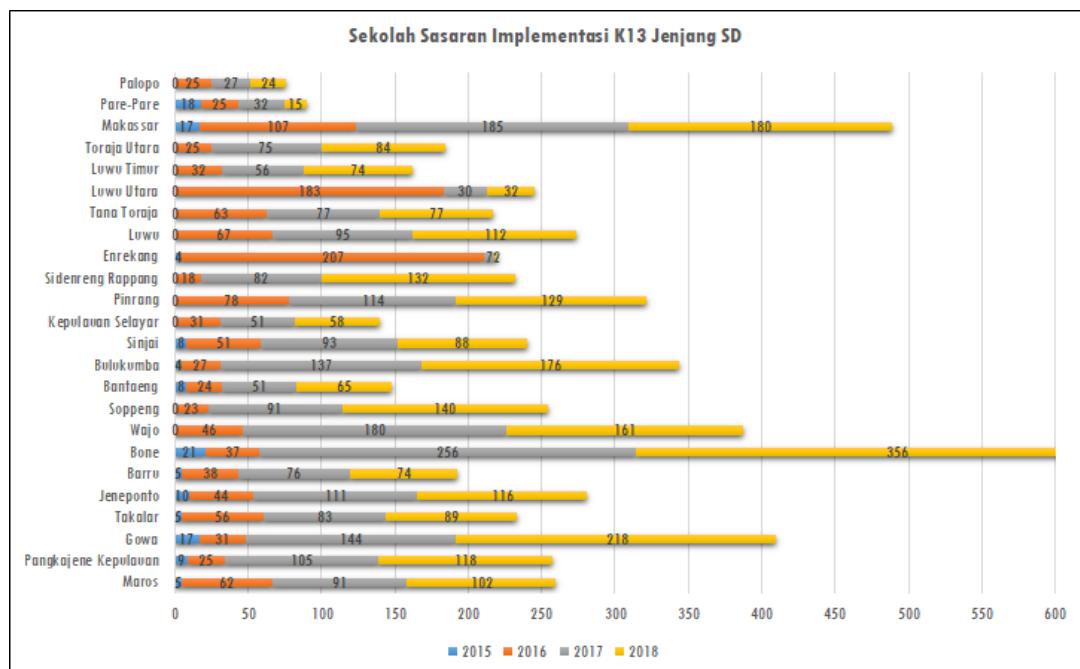


b. Implementasi Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap sejak tahun 2015 dan direncanakan akan dituntaskan secara nasional pada tahun 2019. Total SD yang sudah difasilitasi hingga tahun 2018 sebanyak 6424 (100%) dengan rincian, 6322 difasilitasi menggunakan dana APBN dan 102 sekolah menggunakan dana APBD dan dana mandiri sekolah. Sebanyak 10 SD tidak difasilitasi karena sudah tidak operasional lagi, meskipun masih tercatat dalam Dapodik.



Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD ditunjang oleh kegiatan Rakor Pendampingan K13 Jenjang Dikdas, Bimbingan Teknis Tim Pengembang K13 Tingkat Kab./Kota, Pendampingan *In Implementasi* K13, Pendampingan *On Implementasi* K13, Monitoring dan Evaluasi Implementasi K13.



Fasilitasi dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini telah meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian pembelajaran dengan baik berdasarkan konsep kurikulum 2013. Kemampuan guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang berkualitas yang terintegrasi dengan pendidikan karakter dan kompetensi akan mendorong terwujudnya budaya mutu dan peningkatan mutu satuan pendidikan.

c. Hambatan dan Langkah Antisipasinya

Hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan kegiatan adalah:

1. Adanya penambahan kuota sekolah model SPMI pada saat tahapan awal kegiatan sudah terlaksana.
2. Terbatasnya waktu pelaksanaan setiap tahapan program.
3. Pada umumnya sekolah sasaran Kurikulum 2013 memiliki letak geografis yang sulit dijangkau.
4. Terbatasnya buku panduan guru untuk dipergunakan dalam pendampingan *In Service* dan *On Service*.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk penetapan sekolah model baru.
2. Memaksimalkan waktu yang ada dan mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Pendampingan In Service learning dilaksanakan di TPK berdasarkan zonasi.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan media elektronik sebagai sumber belajar dan membekali peserta buku panduan guru dalam bentuk file soft copy.



IKK 10. "Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
60.94%	60%	100%	167%	80%	125%

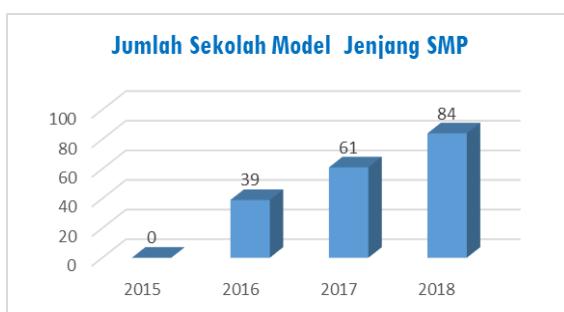


Realisasi kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP hingga tahun 2018 mencapai 100% (1648 SMP). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 60%. Hal ini terjadi karena adanya percepatan penuntasan program fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 yang semula direncanakan akan dituntaskan pada tahun 2019. Ketercapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Pendampingan dan Supervisi Sekolah Model SPMI.

Khusus capaian tahun 2018, dari total 1648 SMP, sebanyak 656 difasilitasi melalui kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 dan sebanyak 84 yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program sekolah model SPMI.

a. Pendampingan Sekolah Model SPMI

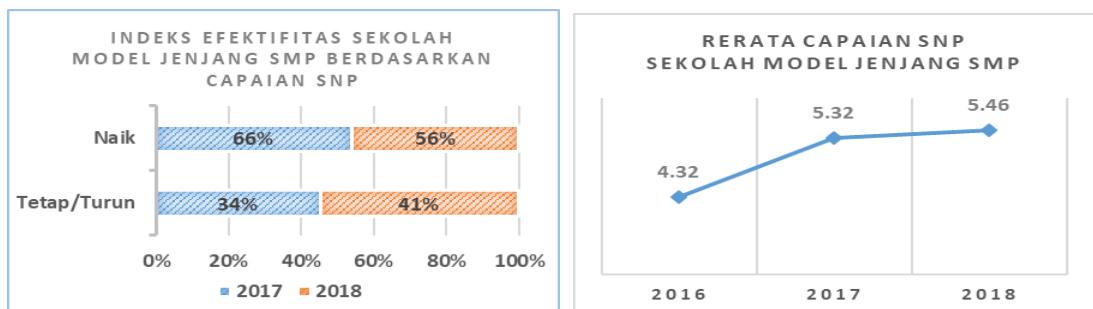
Pendampingan sekolah model bertujuan untuk membentuk budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus SPMI.



Pada tahun 2018 jumlah sekolah model jenjang SMP yang dikembangkan mutunya sebanyak 84 sekolah. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sejumlah 61 sekolah. Tingginya realisasi tersebut dikarenakan adanya pengalihan

kuota sekolah model dari jenjang SMK sebanyak 23 sekolah ke jenjang SMP sebagai respon atas kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mengizinkan satuan pendidikan jenjang SMA/SMK untuk terlibat dalam program ini.

Sebagai catatan, pada tahun 2018, terdapat 11 sekolah model SPMI jenjang SMP yang ditetapkan sebagai sekolah rujukan sehingga harus diganti dengan sekolah lainnya. Dengan demikian, hingga tahun 2018, total 95 SMP yang telah difasilitasi dan disupervisi dalam penerapan SPMI.



Berdasarkan hasil pemetaan mutu tahun 2018, dari 61 sekolah model jenjang SMP yang keluar rapor mutunya, sebanyak 36 SMP atau 56% yang meningkat indeks efektifitasnya.

b. Implementasi Kurikulum 2013

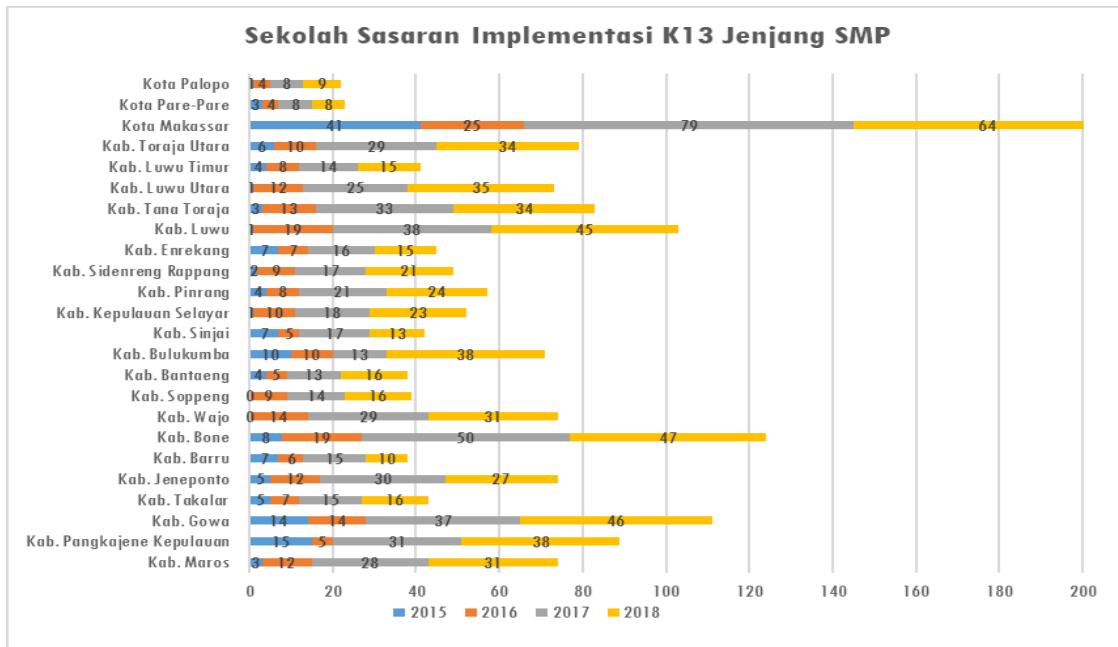
Implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap sejak tahun 2015 dan direncanakan akan dituntaskan secara nasional pada tahun 2019. Total SMP yang sudah difasilitasi hingga tahun 2018 sebanyak 1648 (100%).

Seorang peserta sedang berdiskusi dengan instruktur pada kegiatan Pendampingan *In Service* Implementasi Kurikulum 2013





Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP ditunjang oleh kegiatan Rakor Pendampingan K13 Jenjang Dikdas, Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota, Pendampingan *In* Implementasi K13, Pendampingan *On* Implementasi K13, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013.



c. Hambatan dan Langkah Antisipasinya

Hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan kegiatan adalah:

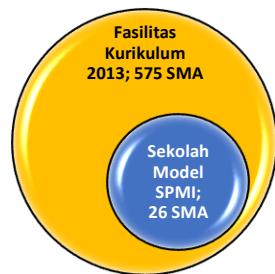
1. Adanya penambahan kuota sekolah model SPMI pada saat tahapan awal kegiatan sudah terlaksana.
2. Terbatasnya waktu pelaksanaan setiap tahapan program kurikulum 2013
3. Pada umumnya sekolah sasaran Implementasi Kurikulum 2013 memiliki letak geografis yang sulit dijangkau.
4. Terbatasnya buku panduan guru untuk dipergunakan dalam pendampingan *In Service* dan *On Service*.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk penetapan sekolah model baru.
2. Memaksimalkan waktu yang ada dan mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Pendampingan *In Service Learning* dilaksanakan di TPK berdasarkan zonasi.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan media elektronik sebagai sumber belajar dan membekali peserta buku panduan guru dalam bentuk file soft copy.

IKK 11. "Percentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
57.24%	60%	98.46%	164%	80%	123%

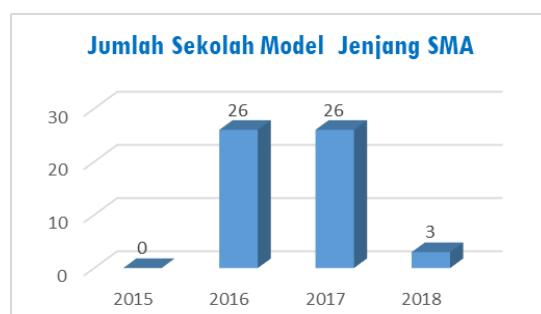


Realisasi kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP hingga tahun 2018 mencapai 98.46% (575 SMA). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 60%. Hal ini terjadi karena adanya percepatan penuntasan program fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 yang semula direncanakan akan dituntaskan pada tahun 2019. Ketercapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Pendampingan dan Supervisi Sekolah Model SPMI.

Khusus capaian tahun 2018, dari total 584 SMA, sebanyak 243 yang difasilitasi melalui kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 dan sebanyak tiga yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program sekolah model SPMI. Semua sekolah model SPMI telah difasilitasi dalam penerapan kurikulum 2013 pada tahun-tahun sebelumnya.

a. Pendampingan Sekolah Model SPMI

Pendampingan sekolah model bertujuan untuk membentuk budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus SPMI, mulai dari pemetaan mutu, perencanaan mutu, pelakasanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan strategi baru.

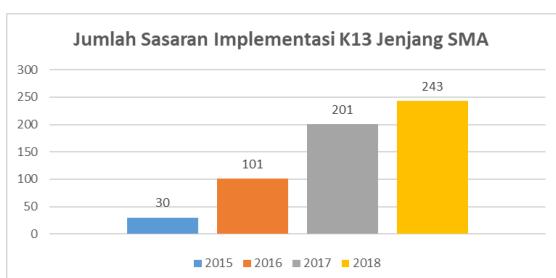


Pada tahun 2018 jumlah sekolah model jenjang SMA yang mengikuti program pendampingan sekolah model SPMI sebanyak 3 sekolah. Jumlah tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan sejumlah 26 sekolah. Rendahnya realisasi tersebut dikarenakan adanya kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menginstrusikan semua satuan

pendidikan jenjang SMA dan SMK untuk tidak melanjutkan/mengikuti program pendampingan sekolah model SPMI.

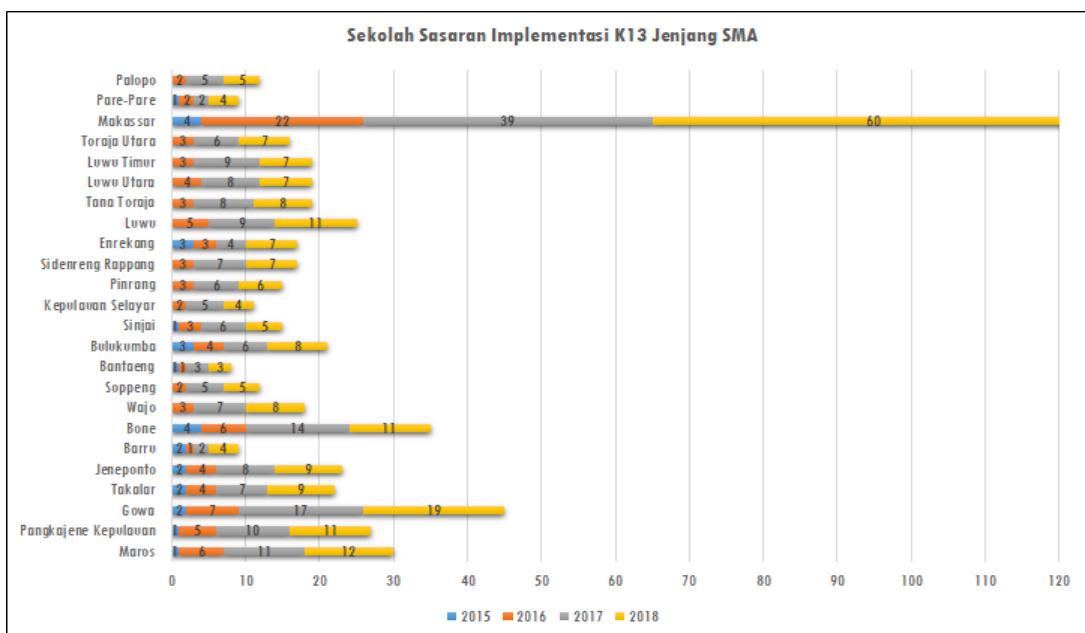
b. Implementasi Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap sejak tahun 2015 dan direncanakan akan dituntaskan secara nasional pada tahun 2019. Total SMA yang sudah difasilitasi hingga tahun 2018 sebanyak 575 (98.46%) dengan rincian, 569 SMA difasilitasi menggunakan dana APBN dan 6 sekolah menggunakan dana mandiri sekolah. Sebanyak 9 SMA tidak difasilitasi karena sudah tidak operasional lagi, meskipun masih tercatat dalam Dapodik.



Ketercapaian Implementasi
Kurikulum 2013 jenjang SMA
ditunjang oleh kegiatan Rakor
Pendampingan Kurikulum 2013
Jenjang Dikdas, Bimbingan Teknis
Tim Pengembang Kurikulum 2013
Tingkat Kab./Kota, Pendampingan In

Implementasi Kurikulum 2013, Pendampingan On Implementasi Kurikulum 2013, Monitoring dan Evaluasi.



c. Hambatan dan Langkah Antisipasinya

Hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan kegiatan adalah:

1. Dinamika kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mengijinkan satuan pendidikan jenjang SMA/SMK untuk melanjutkan mengikuti program pendampingan sekolah model pada saat dana bantuan

pemerintah pengembangan sekolah model sudah terlanjur ditransfer ke beberapa sekolah model SPMI jenjang SMA/SMK.

2. Terbatasnya waktu pelaksanaan setiap tahapan program Kurikulum 2013.
3. Instruktur kab/kota tidak mewakili semua mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang didampingi.
4. Lambatnya penugasan dari dinas pendidikan provinsi.
5. Umumnya sekolah sasaran Implementasi Kurikulum 2013 memiliki letak geografis yang sulit dijangkau.
6. Beberapa sekolah sasaran yang terdaftar diaplikasi sudah tidak aktif.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Segera melakukan pergantian komposisi kuota sekolah model jenjang SMA/SMK ke jenjang SD dan SMP. Selanjutnya segera melakukan penarikan dana bantuan pemerintah untuk selanjutnya diserahkan ke sekolah pengganti.
2. Memaksimalkan waktu yang ada dan mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Penugasan Instruktur berdasarkan rumpun mata pelajaran.
4. Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan dinas pendidikan provinsi dan cabang dinas pendidikan wilayah.
5. Pendampingan *In Service learning* dilaksanakan di TPK berdasarkan zonasi.
6. Menjalin koordinasi dengan cabang dinas wilayah untuk memastikan sekolah tersebut masih aktif atau tidak dan selanjutnya mengajukan surat permohonan penutupan NPSN bagi sekolah yang sudah tidak aktif lagi.

IKK 12. "Percentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi 2017	Tahun 2018			Target Renstra 2019	% Capaian Terhadap Akhir Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
55.81%	60%	90.92%	159%	80%	120%



Realisasi kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP hingga tahun 2018 mencapai 95.92% (432 SMK). Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 60%. Hal ini terjadi karena adanya percepatan penuntasan program fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 yang

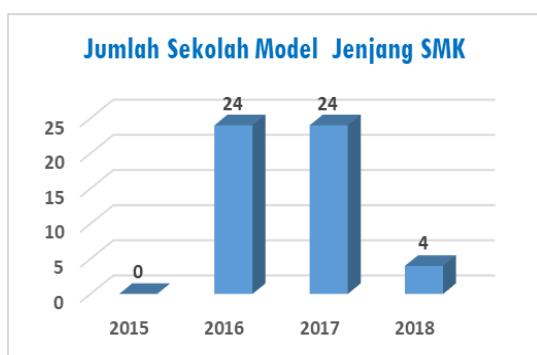
semula direncanakan akan dituntaskan pada tahun 2019. Ketercapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Pendampingan dan Supervisi Sekolah Model SPMI.

Khusus capaian tahun 2018, dari total 441 SMK, sebanyak 243 sekolah yang difasilitasi melalui kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 dan sebanyak 4 sekolah yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui program sekolah model SPMI. Semua sekolah model SPMI telah difasilitasi dalam penerapan kurikulum 2013 pada tahun-tahun sebelumnya.

a. Pendampingan Sekolah Model SPMI

Pendampingan sekolah model bertujuan untuk membentuk budaya mutu satuan pendidikan melalui penerapan siklus SPMI, mulai dari pemetaan mutu, perencanaan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan strategi baru.

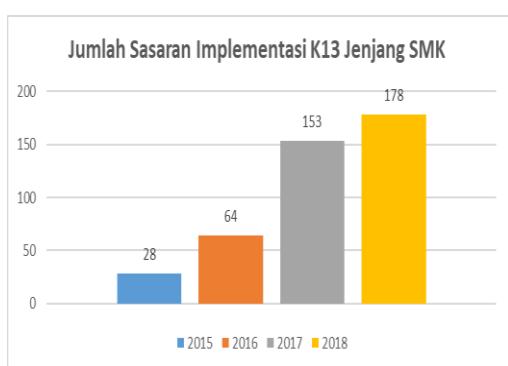
Pada tahun 2018 jumlah sekolah model jenjang SMK yang mengikuti program



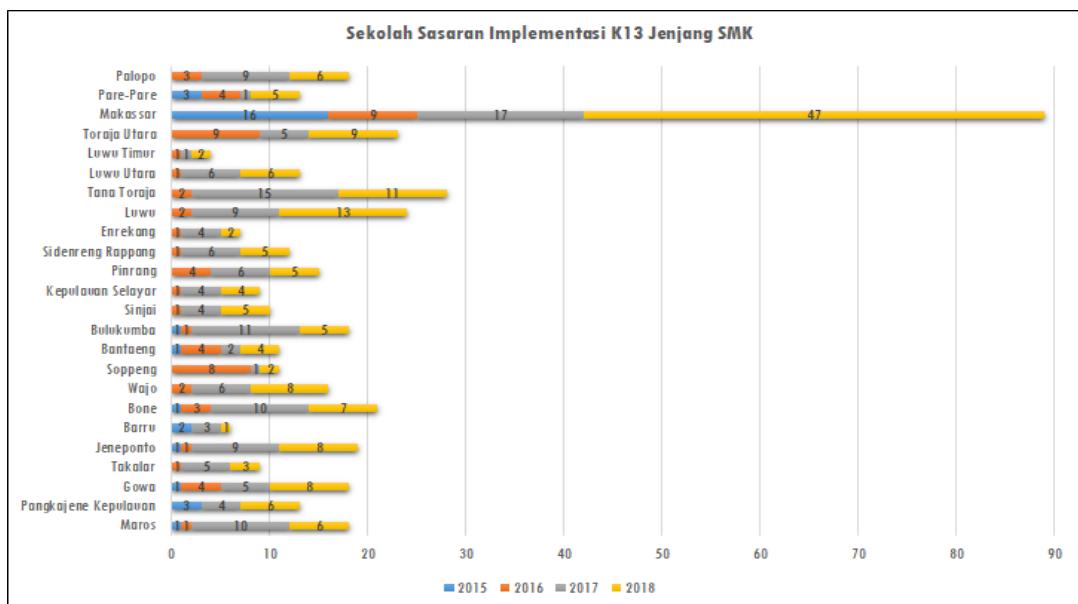
pendampingan SPMI sebanyak 4 sekolah dari target 24 sekolah. Rendahnya realisasi tersebut dikarenakan adanya kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menginstrusikan semua satuan pendidikan jenjang SMA/SMK untuk tidak mengikuti/melanjutkan program pengembangan sekolah model SPMI.

b. Implementasi Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap sejak tahun 2015 dan direncanakan akan dituntaskan secara nasional pada tahun 2019. Total SMK yang sudah difasilitasi hingga tahun 2018 sebanyak 423 (95.92%). Sebanyak 18 SMK tidak difasilitasi karena sudah tidak operasional lagi, meskipun masih tercatat dalam Dapodik.



Ketercapaian Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK ditunjang oleh kegiatan Rakor Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang Dikdas, Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Tingkat Kab./Kota, Pendampingan In Implementasi Kurikulum 2013, Pendampingan On Implementasi Kurikulum 2013, Monitoring dan Evaluasi.



c. Hambatan dan Langkah Antisipasinya

Hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan kegiatan adalah:

1. Terbatasnya waktu pelaksanaan setiap tahapan program.
2. Instruktur kab/kota tidak mewakili semua mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang didampingi.
3. Lambatnya penugasan dari dinas pendidikan provinsi.
4. Umumnya sekolah sasaran memiliki letak geografis yang sulit dijangkau.
5. Beberapa sekolah sasaran yang terdaftar diaplikasi sudah tidak aktif.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Memaksimalkan waktu yang ada dan mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
2. Penugasan Instruktur berdasarkan rumpun mata pelajaran.
3. Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan dinas pendidikan provinsi dan cabang dinas pendidikan wilayah.
4. Pendampingan *In Service Learning* dilaksanakan di TPK berdasarkan zonasi.
5. Menjalin koordinasi dengan cabang dinas wilayah untuk memastikan sekolah tersebut masih aktif atau tidak dan selanjutnya mengajukan surat permohonan penutupan NPSN bagi sekolah yang sudah tidak aktif lagi.



Sasaran Kegiatan 2. "Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik"

Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik ditandai dengan peningkatan nilai (kategori) akuntabilitas kinerja setiap tahunnya.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk ketercapaian sasaran ini antara lain:

1. Penguatan SAKIP
2. Peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai kegiatan seperti Bimtek Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan, Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, Bimtek Public Speaking, *In Haouse Traning* (IHT), dan Bimtek Pengembangan Video Pembelajaran.
3. Pengelolaan dan pengembangan data dan sistem informasi melalui Pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT), publikasi dan layanan informasi melalui laman LPMP, perpustakaan *online*, penerbitan jurnal dan bulletin, dan Sistem Informasi Kegiatan (*Simkeg*) yang memuat program kegiatan LPMP Sulawesi Selatan.



IKK 13. "Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan".

Target	92	Renstra 2019	
Realisasi	95%	Target	Capaian
Capaian	103%	95%	109%

Indikator ini diukur berdasarkan keterlaksanaan tiga aspek, yaitu sinkronisasi data satuan pendidikan ke server dapodik pusat yang dilakukan setiap semester, pemanfaatan data series dapodik, dan verifikasi data satuan pendidikan yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke sekolah example untuk memastikan validitas data Dapodik.

Upaya yang dilakukan untuk ketercapaian indikator ini adalah:

1. Melakukan bimbingan teknis pengelolaan Dapodikdasmen kepada Operator Dapodik Provinsi/Kab./Kota.
2. Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data Dapodik dan PMP.

- Melaksanakan kegiatan konsolidasi untuk mengunjungi dan mendampingi satuan pendidikan yang mengalami kesulitan/masalah dalam pengiriman data pemetaan mutu pendidikan.

Permasalahan

- Beberapa satuan pendidikan masih terdaftar dalam Dapodik, meskipun sudah tidak operasional lagi.
- Kewenangan LPMP Sulawesi Selatan dalam pengelolaan Dapodik sangat terbatas.
- Seringnya terjadi pergantian operator sekolah.
- Kegagalan sinkronisasi data satuan pendidikan dengan server Dapodik di Pusat.
- Letak geografis beberapa sekolah yang cukup jauh dari ibukota kabupaten/kota disertai dengan ketidadaan jaringan listrik maupun internet mengakibatkan lambatnya proses sinkronisasi data ke server pusat.



Langkah antisipasi :

- Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan keaktifan satuan pendidikan dan mengusulkan untuk menutup atau menghapus NPSN sekolah yang sudah tidak operasional lagi.
- Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan semua pengelola pendataan untuk memastikan semua data satuan pendidikan telah terupdate sesuai jadwal.
- Melakukan bimbingan teknis pengelola dapodik untuk meminimalisir kegagalan sinkron data ke server pusat.

KK 14. "Nilai SAKIP LPMP Sulawesi Selatan 78"

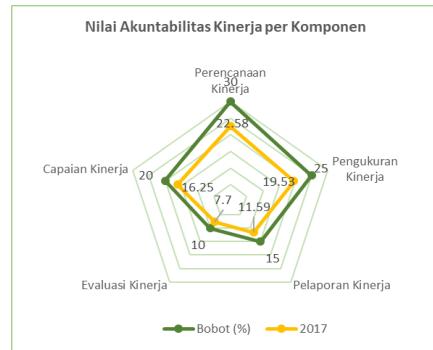
Target	78	Renstra 2019	
Realisasi	77.65	Target	Capaian
Capaian	99.55%	81	95.86%



Nilai akuntabilitas kinerja LPMP Sulawesi Selatan tahun 2018 berada pada kategori "BB" dengan total skor 77.65. Capaian tersebut diatas skor SAKIP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan skor 75.93.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja LPMP Sulawesi Selatan, antara lain:

1. Revisi Renstra 2015-2019
2. Mengoptimalkan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Penetapan tim SAKIP
4. Penetapan kontrak kerja pada semua eselon.
5. Sosialisasi penerapan akuntabilitas kinerja kepada semua unsur dalam lingkup LPMP Sulawesi Selatan.



Permasalahan:

1. Indikator tujuan strategis Renstra belum menggambarkan target secara jelas.
2. Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kinerja dan anggaran.
3. Aplikasi Pengukuran kinerja (eperformance.kemdikbud.go.id) belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Belum terlaksananya pemantauan dan evaluasi SAKIP secara mandiri.
5. Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan capaian dengan target akhir renstra.

Langkah-langkah perbaikan:

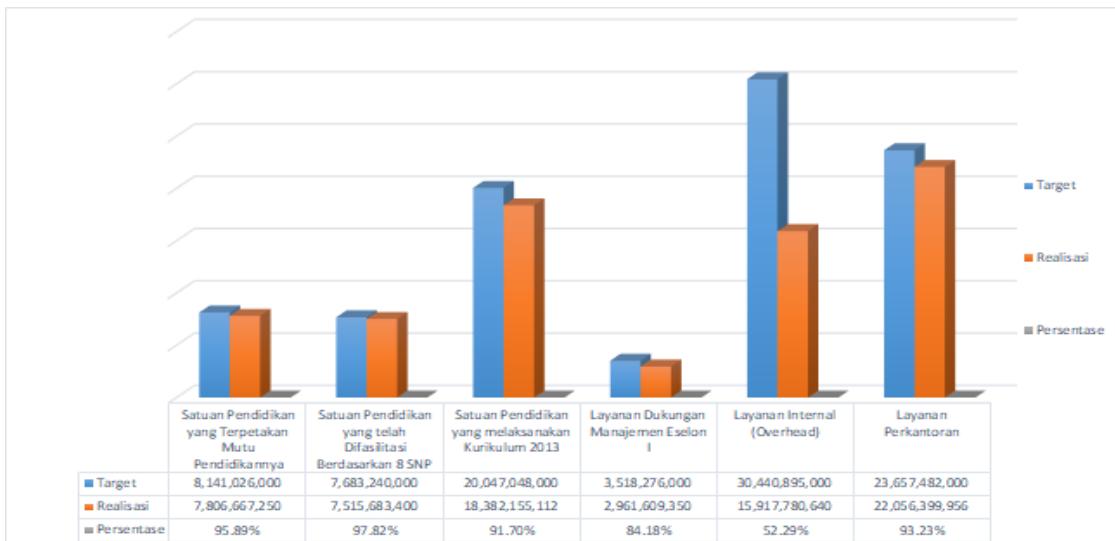
1. Melakukan reviu terhadap Renstra 2015 -2019 utamanya pada tujuan indikator strategis.
2. Penyusunan rencana kinerja dan anggaran mengacu pada renstra.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran secara periodik melalui Aplikasi Pengukuran kinerja (eperformance.kemdikbud.go.id).
4. Membentuk tim evaluasi SAKIP LPMP Sulawesi Selatan.
5. Laporan kinerja menyajikan perbandingan capaian dengan target akhir renstra.

Selain 14 indikator kinerja yang dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Sulawesi Selatan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat beberapa kegiatan penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berupa layanan Dukungan Manajemen, Layanan Internal (belanja Modal), dan Layanan Tata Kelola Perkantoran.

Selain capaian-capaian tersebut diatas, pada tahun 2018, LPMP Sulawesi Selatan melaksanakan beberapa kegiatan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti bimbingan teknis SPMI sekolah rujukan jenjang SMP, workshop penulis buku guru, diklat pendidikan karakter, pelatihan pembinaan kelompok kerja pengawas sekolah, seleksi calon kepala sekolah, fasilitasi penguatan kepala sekolah, dan bimbingan teknis persiapan pendidikan profesi guru.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran LPMP Sulawesi Selatan dalam DIPA tahun 2018 sebesar Rp. 93.487.967.000 yang terdistribusi dalam enam output/kegiatan. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 74.644.595.218 dengan persentase daya serap sebesar 79.84%. Grafik berikut ini menyajikan persentase realisasi anggaran LPMP Sulawesi Selatan tahun 2018 pada masing-masing output.



Realisasi anggaran LPMP Sulawesi Selatan tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 94,36%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut antara lain disebabkan adanya anggaran dengan status blokir sebesar Rp.12.262.708.000 atau 13,12% dari total pagu. Selain itu rendahnya daya serap tersebut juga disebabkan adanya sisa anggaran dari pengadaan lelang belanja modal yang tidak bisa dialihkan atau direvisi ke kegiatan lain.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiaya pencapaian kegiatan peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang terdistribusi dalam dua sasaran kegiatan dengan 14 indikator kinerja kegiatannya. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

**Capaian Realisasi Anggaran
berdasarkan Sasaran/Indikator Kinerja
Tahun 2018**

Sasaran/Indikator		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir	Realisasi	% Penyerapan
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					34,752,806,000	35,871,314,000	33,704,505,762	93.96%
Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	9,092 SD,SMP, SMA,SMK	9002 SD,SMP, SMA,SMK			7,834,626,000	8,141,026,000	7,806,667,250	95.89%
1 SD yang telah dipetakan mutunya	100%	6413	100%					

Sasaran/Indikator		Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir	Realisasi	% Penyerapan
2	Percentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya	75%	54%	72%				
3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	557	95.38%				
4	Percentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya	80%	51%	64%				
5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	6424	99.84%				
6	Percentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya	80%	45%	57%				
7	SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	404	91.61%				
8	Percentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya	70%	47%	68%				
Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP		480 SD,SMP, SMA,SMK	480	100%	7,662,240,000	7,683,240,000	7,515,683,400	97.79%
Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013		3.636 SD,SMP, SMA,SMK	3792	115%	19,255,940,000	20,047,048,000	18,382,155,112	91.67%
9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	100%	166.41%				
10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	100%	166.67%				
11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	98.46%	164.10%				
12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	95.92%	159.86%				
Terwujudnya Tata Kelola LPMP Sulawesi Selatan yang Baik								
1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	92%	95%	103%	345,668,000			
2	Nilai Minimal SAKIP LPMP Sulawesi Selatan	78	77.64	100%				

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Sasaran strategis "Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan", dengan total anggaran sebesar Rp. 35.871.314.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung ketercapaian 12 indikator kinerja kegiatan dengan rincian:
 - a. Indikator kinerja satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya (dan persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektifitasnya) dengan total anggaran Rp. 8.141.026.000, terealisasi sebesar Rp.

7,806,667,250 atau sebesar 95.89%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai ketercapaian 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan.

- b. Indikator kinerja satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK) yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP terdiri dari 4 indikator kinerja kegiatan. Dalam DIPA terdistribusi pada dua output/kegiatan, yaitu:
 - Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP dengan total anggaran sebesar Rp. 7.683.240.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7,515,683,400 (97.79%).
 - Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD, SMP, SMA, dan SMK) dengan total anggaran sebesar Rp. 20,047,048,000 dengan realisasi sebesar Rp. 18,382,155,112 (91.67%).
2. Sasaran strategis "Terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik" dengan 2 (dua) indikator kinerjanya, tidak disediakan anggaran khusus, akan tetapi ketercapaian indikator tersebut ditunjang oleh semua kegiatan yang ada dalam DIPA LPMP Sulawesi Selatan.

Efisiensi Anggaran

LPMP Sulawesi Selatan pada tahun 2018 telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 13%. Perhitungan efisiensi tersebut berdasarkan kinerja anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sesuai PMK No. 249 Tahun 2011. Hasil efisiensi tersebut berasal dari penghematan belanja barang yang meliputi perjalanan dinas dan paket meeting, belanja jasa, dan belanja operasional lainnya serta belanja modal.

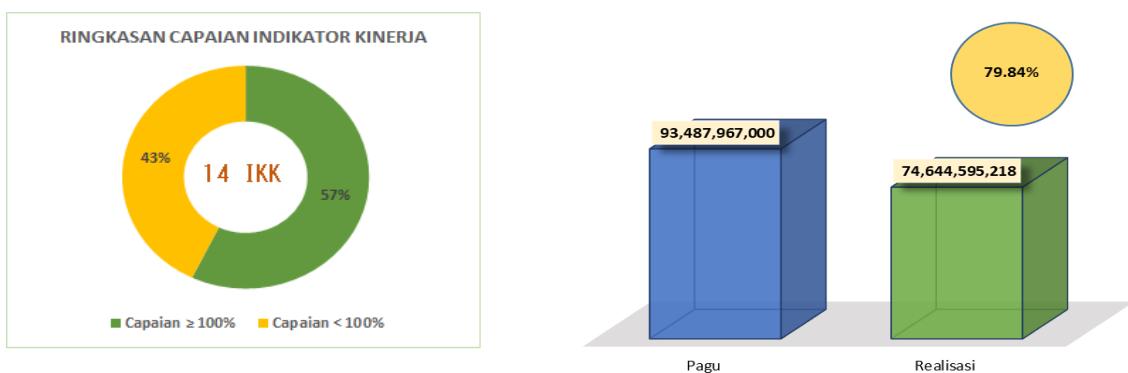
Pada tahun 2018, LPMP Sulawesi Selatan telah melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp. 1.118.508.000 untuk mendukung capaian kinerja fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan berupa penambahan satuan pendidikan sasaran pendampingan kurikulum 2013 untuk jenjang SD, SMA, dan SMK, pelaksanaan kegiatan rakor Implementasi Kurikulum 2013, Workshop Implementasi Model PMP melalui Penguatan Pendidikan Karakter, Sosialisasi Model PMP Melalui Implementasi PPK, dan Bimbingan Teknis SPMI Kepala Sekolah Model.

Optimalisasi anggaran juga digunakan untuk kegiatan yang mendukung terwujudnya tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik berupa peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai kegiatan seperti Bimtek Pengembangan Kapasitas Pengelola Keuangan, Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, Bimtek Public Speaking, *In Haouse Traning* (IHT), Bimtek Pengembangan Video Pembelajaran, dan review Renstra.

BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2018, LPMP Sulawesi Selatan berhasil melaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu **mendapatkan perhatian** antara lain :

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah bagi keterlaksanaan penjaminan mutu pendidikan.
2. Pemahaman pemangku kepentingan tentang pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pemanfaatan rapor mutu untuk melakukan peningkatan mutu.
4. Pengembangan aplikasi pegolahan data mutu pendidikan.
5. Validitas data satuan pendidikan.

Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, beberapa **fokus perbaikan** yang akan dilakukan kedepan antara lain:

1. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam bidang penjaminan mutu pendidikan dengan pemerintah daerah
2. Pendampingan satuan pendidikan untuk mempercepat proses pemenuhan SNP
3. Peningkatan kualitas layanan publik.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja

2 Pengukuran Kinerja

3 Lembar Review



Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan;
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

TARGET CAPAIAN

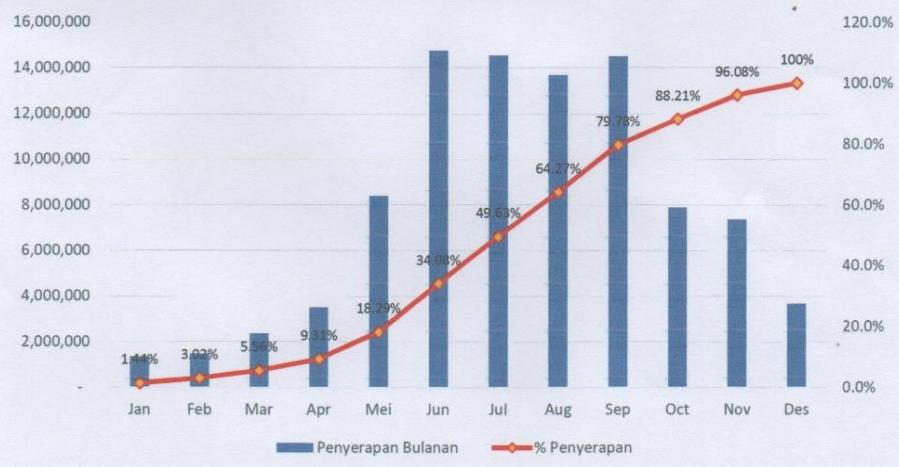
PROGRAM : Pendidikan Dasar dan Menengah
KEGIATAN : Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	ANGGARAN
1	2	3	4
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	9.092,00 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	7.834.626.000
	1 SD yang telah dipetakan mutunya 2 Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya Output: <i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	100% 75% 6.428	
	3 SMP yang telah dipetakan mutunya 4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya Output: <i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	100% 80% 1.643	
	5 SMA yang telah dipetakan mutunya 6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya Output: <i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	100% 80% 582	
	7 SMK yang telah dipetakan mutunya 8 Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya Output: <i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	90% 70% 439	
	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	480,00 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	7.662.240.000
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	3.636,00 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	19.255.940.000
	9 SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output: a. <i>SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i> b. <i>SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	60% 369 2.568	13.707.689.000 5.475.309.000 8.232.380.000
	10 SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output: a. <i>SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP</i> b. <i>SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	60% 61 657	7.026.289.000 1.005.669.000 6.020.620.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	ANGGARAN
	11 SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	4.232.950.000
	<i>Output:</i> a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	26	798.150.000
	b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	234	3.434.800.000
	12 SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	1.568.140.000
	<i>Output:</i> a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	24	383.112.000
	b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	177	1.568.140.000
2. Terwujudnya Tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik	1 Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	92%	345.668.000
	2 Nilai Minimal SAKIP LPMP Sulawesi Selatan	78	

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan : Rp. 93.487.967.000,- (Sembilan puluh tiga miliar empat ratus depalan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2018 LPMP SULAWESI SELATAN



KOMPONEN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
Penyerapan Bulanan	1,346,227	1,477,110	2,374,594	3,505,799	8,395,219	14,761,750	14,537,379	13,686,638	14,499,984	7,881,036	7,357,503	3,664,728
Penyerapan Kumulatif	1,346,227	2,823,337	5,197,931	8,703,730	17,098,949	31,860,699	46,398,078	60,084,717	74,584,700	82,465,736	89,823,239	93,487,967
% Penyerapan	1.44%	3.02%	5.56%	9.31%	18.29%	34.08%	49.63%	64.27%	79.78%	88.21%	96.08%	100%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 08 Januari 2018



PENGUKURAN KINERJA
LPMP SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

Sasaran Kegiatan	Sasaran/Indikator	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir	Realisasi	% Penyerapan
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	0	8952 SD,SMP, SMA,SMK	8655 SD,SMP, SMA,SMK	9092 SD,SMP, SMA,SMK	9002		7,834,626,000	8,141,026,000	7,806,667,250	95.89%
	1 SD yang telah dipetakan mutunya	0	99.30%	97.69%	100%	100%	100%	5,539,042,667			
	2 Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya	0	0	62%	75%	54%	72%				
	Output: SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	0	6363	6260	6428	6413					
	3 SMP yang telah dipetakan mutunya	0	98.17%	93.46%	100%	98.79%	98.79%	1,415,782,063			
	4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya	0	0%	67%	80%	51.25%	64.06%				
	Output: SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	0	1606	1529	1643	1628					
	5 SMA yang telah dipetakan mutunya	0	96.55%	88.105	100%	95.38%	95.38%	501,512,575			
	6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya	0	0	71%	80%	45.23%	56.53 %				
	Output: SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	0	560	511	582	557					
	7 SMK yang telah dipetakan mutunya	0	95.06%	80.50%	90%	91.61%	101.79%	378,288,695			
	8 Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya	0	0%	75%	70%	47.27%	67.52%				
	Output: SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	0	423	355	439	404					
	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	0	384	480	480 SD,SMP, SMA,SMK	480	100%	7,662,240,000	7,683,240,000	7,515,683,400	97.79%

Sasaran Kegiatan	Sasaran/Indikator	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir	Realisasi	% Penyerapan
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	342	1736	2891	3.636 SD,SMP, SMA,SMK	37	115%	9,255,940,000	20,047,048,000	18,382,155,112	91.67%
9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	2%	22.74%	57.74%	60%	100%	166.41%	13,707,689,000			
	Output: a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	0	295	369	369	389		5,475,309,000			
	b. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	132	1325	2243	2568	2724		8,232,380,000	7,750,573,000	6,965,730,000	89.87%
10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	9.29%	26.77%	60.94%	60%	100%	166.67%	7,026,289,000			
	Output: a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	0	39	61	61	84		1,005,669,000			
	b. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	152	247	598	657	656		6,020,620,000	5,523,707,000	4,899,881,700	8878.10%
11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	5.17%	22.59%	57.24%	60%	98.46%	164.10%	4,232,950,000			
	Output: a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	0	26	26	26	3		798,150,000			
	b. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	30	101	201	234	243		3,434,800,000	4,100,341,000	3,942,033,850	96.14%
12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	6.29%	20.96%	55.81%	60%	95.92%	159.86%	1,568,140,000			
	Output: a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	0	24	24	24	4		383,112,000			

Laporan Kinerja LPMP Sulawesi Selatan | 2018

Sasaran Kegiatan	Sasaran/Indikator		Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir	Realisasi	% Penyerapan
		b. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	28	64	153	177	178		1,568,140,000	2,672,427,000	2,574,509,562	96.34%
2. Terwujudnya Tata kelola LPMP Sulawesi Selatan yang baik	1	Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan	0	0	0	92%	94%	102%	345,668,000			
	2	Nilai Minimal SAKIP LPMP Sulawesi Selatan	0	0	0	78	77.64	100%				

**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
LPMP SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018**

Kami telah mereview laporan kinerja LPMP Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2018 sesuai pedoman review atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen LPMP Sulawesi Selatan.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Makassar, 25 Januari 2019
Ketua Tim Pereview



Dra. Sitti Hasanatang, M.Pd.
Nip. 196504101991032001